



SUNFLOWER MOVEMENT DI TAIWAN TAHUN 2014

(SUNFLOWER MOVEMENT IN TAIWAN 2014)

SKRIPSI

Oleh

Rifqi Dwi Anggraeni

120910101077

**ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

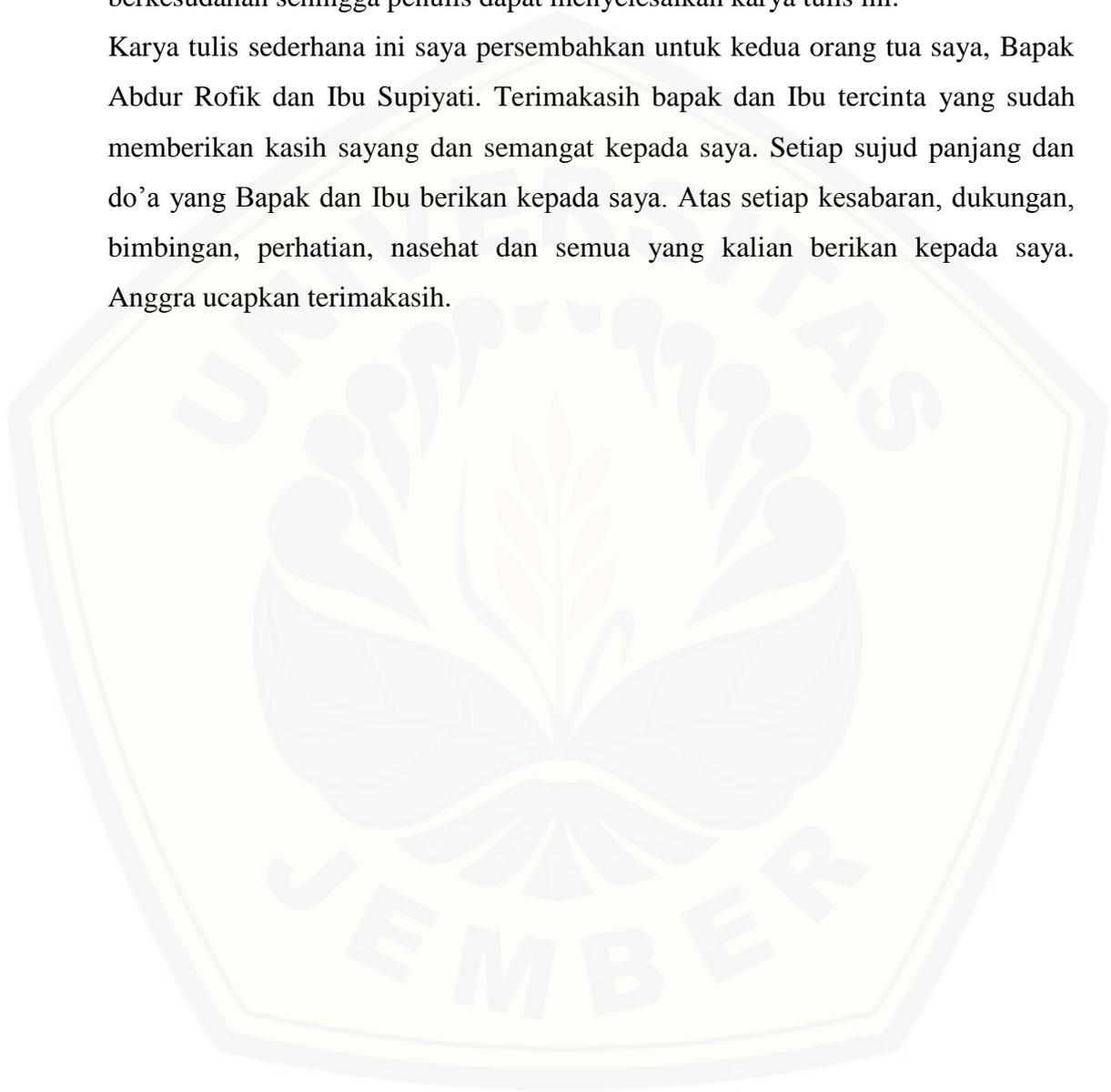
UNIVERSITAS JEMBER

2016

PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan berkat yang tiada berkesudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini.

Karya tulis sederhana ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya, Bapak Abdur Rofik dan Ibu Supiyati. Terimakasih bapak dan Ibu tercinta yang sudah memberikan kasih sayang dan semangat kepada saya. Setiap sujud panjang dan do'a yang Bapak dan Ibu berikan kepada saya. Atas setiap kesabaran, dukungan, bimbingan, perhatian, nasehat dan semua yang kalian berikan kepada saya. Anggra ucapkan terimakasih.



MOTO

Bismillah



PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rifqi Dwi Anggraeni

NIM : 120910101077

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Gerakan Bunga Matahari di Taiwan Tahun 2014 (*Sunflower Movement in Taiwan 2014*) adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi manapun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan ssebenar-benarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 6 Desember2016

Yang menyatakan,

Rifqi Dwi Anggraeni

120910101077

SKRIPSI

SUNFLOWER MOVEMENT DI TAIWAN TAHUN 2014

(SUNFLOWER MOVEMENT IN TAIWAN 2014)

Oleh

RIFQI DWI ANGGRAENI

NIM. 120910101077

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Drs. M. Nur Hasan, M. Hum

Dosen Pembimbing Anggota : Drs. Agung Purwanto, M. Si

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “**SUNFLOWER MOVEMENT DI TAIWAN TAHUN 2014**
(*SUNFLOWER MOVEMENT IN TAIWAN 2014*)” telah diuji dan di sahkan
pada,

Hari : Selasa
Tanggal : 6 Desember 2016
Waktu : 09.00 WIB
Tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Tim Penguji:
Ketua

Drs. Abubakar Eby Hara, MA, Ph. D
NIP. 196402081989020001

Sekretaris I

Sekretaris II

Drs. M. Nur Hasan, M. Hum
NIP. 1959042319870210001

Drs. Agung Purwanto, M. Si
NIP. 196810221993031002

Anggota I

Anggota II

Fuat Albayumi, S. IP, MA NIP.
1974042420050110002

Dr.Sunardi Purwaatmoko, MIS
NIP. 1960101519890310002

Mengesahkan
Dekan,

Drs. Ardiyanto, M. Si
NIP. 19580810198700210002

RINGKASAN

“*SUNFLOWER MOVEMENT DI TAIWAN TAHUN 2014 (SUNFLOWER MOVEMENT IN TAIWAN 2014)*”; Rifqi Dwi Anggraeni, 120910101077, 2016; 85 Halaman; Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Taiwan merupakan salah satu negara dikawasan Asia Timur yang memiliki struktur perekonomian yang terdiri dari industri kecil dan menengah yang berkembang pesat dan menghasilkan produk-produk unggulan yang dapat bersaing di pasar internasional. Integrasi ekonomi yang dilakukan Taiwan pada masa pemerintahan Ma Ying Jeou dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Taiwan. Kesepakatan perjanjian perdagangan dilakakukan untuk mewujudkan hal tersebut. Perjanjian antara China dan Taiwan yaitu kerangka perjanjian *Economic Cooperation Framework Agreement (ECFA)* dan kemudian dilanjutkan dengan *Cross Straits Service Trade Agreement (CSSTA)* yang membahas tentang perjanjian perdagangan lintas – selat antara China dan Taiwan. Melalui kerjasama ECFA dan CSSTA ini pemerintah diharapkan mampu membuat perekonomian Taiwan tumbuh. Namun pada tahun 2014 terjadi gerakan sosial yang dilakukan oleh mahasiswa dan masyarakat sipil Taiwan yang bertujuan untuk menuntut pemerintah atas diratifikasinya perjanjian CSSTA antara China dan Taiwan tersebut. Perkembangan masyarakat Taiwan yang semakin demokratis membuat mereka menjadi aktor penting dalam berjalannya demokrasi di Taiwan. Mereka menilai bahwa pemerintah harus lebih hati-hati dalam mengkaji setiap klausul perjanjian dengan China karena dalam CSSTA ini terdapat beberapa klausul yang merugikan pihak indutsri kecil dan menengah di Taiwan. Pemerintah yang diminta untuk melakukan peninjauan ulang justru langsung meratifikasi perjanjian tersebut sehingga membuat masyarakat Taiwan marah dan melakukan gerakan sosial yang disebut *Sunflower Movement*.

Dari latar belakang tersebut maka skripsi ini akan membahas tentang apa yang menyebabkan terjadinya *Sunflower Movement* di Taiwan tahun 2014. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka, data yang terkumpul

kemudian dianalisis dengan metode deskriptif. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori partisipasi politik (*politic participation theory*) dan teori mobilisasi sumberdaya (*resource mobilization theory*)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya Sunflower Movement di Taiwan pada tahun 2014, yaitu

1. Faktor partisipasi masyarakat Taiwan yang menjadi faktor utama berkumpulnya massa dalam upaya menyampaikan aspirasi mereka kepada pemerintah terkait CSSTA.
2. Faktor Ekonomi, dimana integrasi ekonomi yang dilakukan pemerintah China melalui perjanjian ECFA dan kemudian CSSTA justru mendapat penolakan karena adanya klausul perjanjian *Early Harvest* yang dianggap dapat merugikan pelaku industri kecil-menengah di Taiwan.
3. Faktor Politik, faktor ini terkait dengan proses ratifikasi yang dilakukan oleh Pemerintah Taiwan dan China dianggap tidak transparan. Tuntutan yang diminta oleh demostran terkait dengan peninjauan kembali klausul perjanjian tidak dilakukan sesuai dengan prosedur demokrasi yang di junjung tinggi oleh masyarakat Taiwan
4. Faktor Kepemimpinan dan Organisasi, kultur masyarakat Taiwan yang sudah terbiasa dengan adanya gerakan sosial, LSM dan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi di negara membuat mereka akan mudah melakukan gerakan dan menyampaikan tuntutan mereka kepada pemerintah. Keberadaan LSM dan Organisasi sosial yang semakin hari semakin diperhatikan oleh pemerintah menjadi sarana yang memudahkan masyarakat untuk bergerak. Karena di Taiwan sendiri, menyampaikan pendapat dari masyarakat kepada pemerintah ini menjadi katalisator demokrasi di Taiwan.

PRAKATA

Alhamdulillah hirobbilalamin, Puji Syukur kepada Allah SWT atas segala Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang *Sunflower Movement* di Taiwan Tahun 2014. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Dalam penyusunan skripsi ini, banyak pihak yang mendukung dan memberi bantuan kepada penulis. Oleh sebab itu, penulis menyampaikan banyak terimakasih yang tak terhingga atas bimbingan, bantuan serta dukungan yang telah diberikan demi kelancaran penyelesaian skripsi ini, terutama kepada:

1. Bapak dan Ibu di rumah, yang telah memberikan dukungan, semangat, do'a yang luar biasa melimpahnya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini,
2. Bapak M. Nur Hasan, M. Hum selaku pembimbing I, Bapak Agung Purwanto, M. Si selaku dosen pembimbing II, yang telah meluangkan waktu di antara serangkaian kesibukan untuk membimbing, serta memberikan saran masukan bagi penulis dalam mengerjakan skripsi ini,
3. Bapak dan Ibu dosen jurusan Hubungan Internasional FISIP Universitas Jember yang telah memberikan ilmu dan bimbingannya selama penulis menjadi mahasiswa
4. Sahabat-sahabatku, Muhammad Maharani Soebroto, Aad Rifqy, Nindia Eka, Nurmalita Widasari, Reza Anugerah Eka, Rahma Amelia, Taufik Qurrahman, Resha Sirtia, Ayu Farida, Syahthan Thowi, Nalendra Yogeswara, Muhammad Fairus Sultan yang telah memberikan semangat serta motivasi yang luar biasa kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini,

5. Teman-teman Jurusan Hubungan Internasional 2012 yang telah menemani penulis selama menempuh pendidikan di jurusan ini, memberi semangat, diskusi dan member cerita tersendiri bagi penulis,
6. Teman-teman Jurusan Hubungan Internasional secara keseluruhan yang telah berbagi ilmu dan berdiskusi dengan penulis,
7. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu atas bantuannya dalam penyelesaian skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini tentu masih terdapat kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu penulis menerima segala kritik serta saran demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat.

Jember, 6 Desember 2016

Penulis

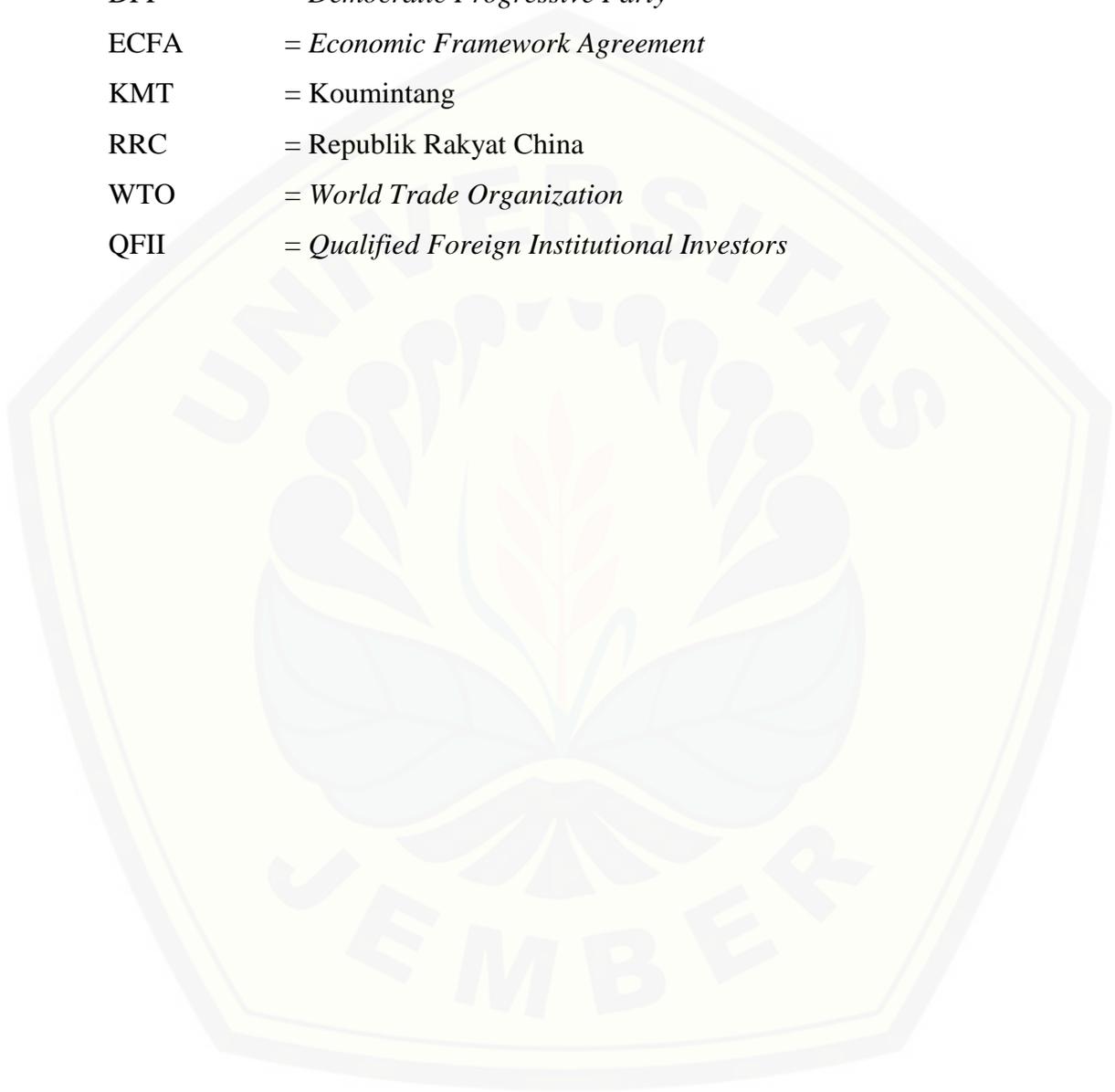
DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN PEMBIMBINGAN.....	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
RINGKASAN	vii
PRAKATA	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR SINGKATAN.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB 1. PENDAHULUAN 1	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Ruang Lingkup Permasalahan.....	6
1.2.1 Batasan Materi	7
1.2.2 Batasan Waktu	7
1.3 Rumusan Masalah	7
1.4 Tujuan Penelitian	8
1.5 Kerangka Pemikiran.....	9
1.5.1. Teori Partisipasi Politik (<i>The Politic Participation Theory</i>).....	9
1.5.1 Teori Mobilisasi Sumberdaya (<i>The Resource Mobilization Theory</i>)	13
1.6 Argumen Utama	19
1.7 Metode Penelitian	20
1.7.1 Metode Pengumpulan Data	20
1.7.2 Metode Analisis Data	20

1.8 Sistematika Penulisan	21
BAB 2. PERKEMBANGAN MASYARAKAT SIPIL TAIWAN	23
2.1 Masyarakat Sipil Sebagai Katalis Demokratisasi.....	23
2.2 Elemen Struktural Masyarakat Sipil di Taiwan.....	26
2.3 Sosio – Ekonomi dan Sosial Budaya sebagai Latar Belakang Munculnya Masyarakat Sipil di Taiwan	45
2.4 Peraturan Hukum “Sektor Ketiga”	49
BAB 3. TERJADINYA <i>SUNFLOWER MOVEMENT</i> DI TAIWAN TAHUN 2014	52
3.1. Kebijakan Taiwan terhadap China dibawah Pemerintahan Presiden Ma Ying Jeou.....	52
3.2. Penandatanganan Perjanjian Lintas – Selat	54
3.3. Munculnya <i>Sunflower Movement</i> di Taiwan	57
BAB 4. <i>SUNFLOWER MOVEMENT</i> SEBAGAI RESPON MASYARAKAT TAIWAN TERHADAP PERJANJIAN DAGANG LINTAS-SELAT	61
4.1. Faktor Partisipasi Politik.....	62
4.2. Faktor Ekonomi.....	65
4.3. Faktor Politik.....	69
4.4. Faktor Organisasi dan Kepimpinan.....	76
4.5.Respon Pemerintah Taiwan terhadap munculnya <i>Sunflower Movement</i>	78
BAB 5. KESIMPULAN	83
DAFTAR PUSTAKA	85

DAFTAR SINGKATAN

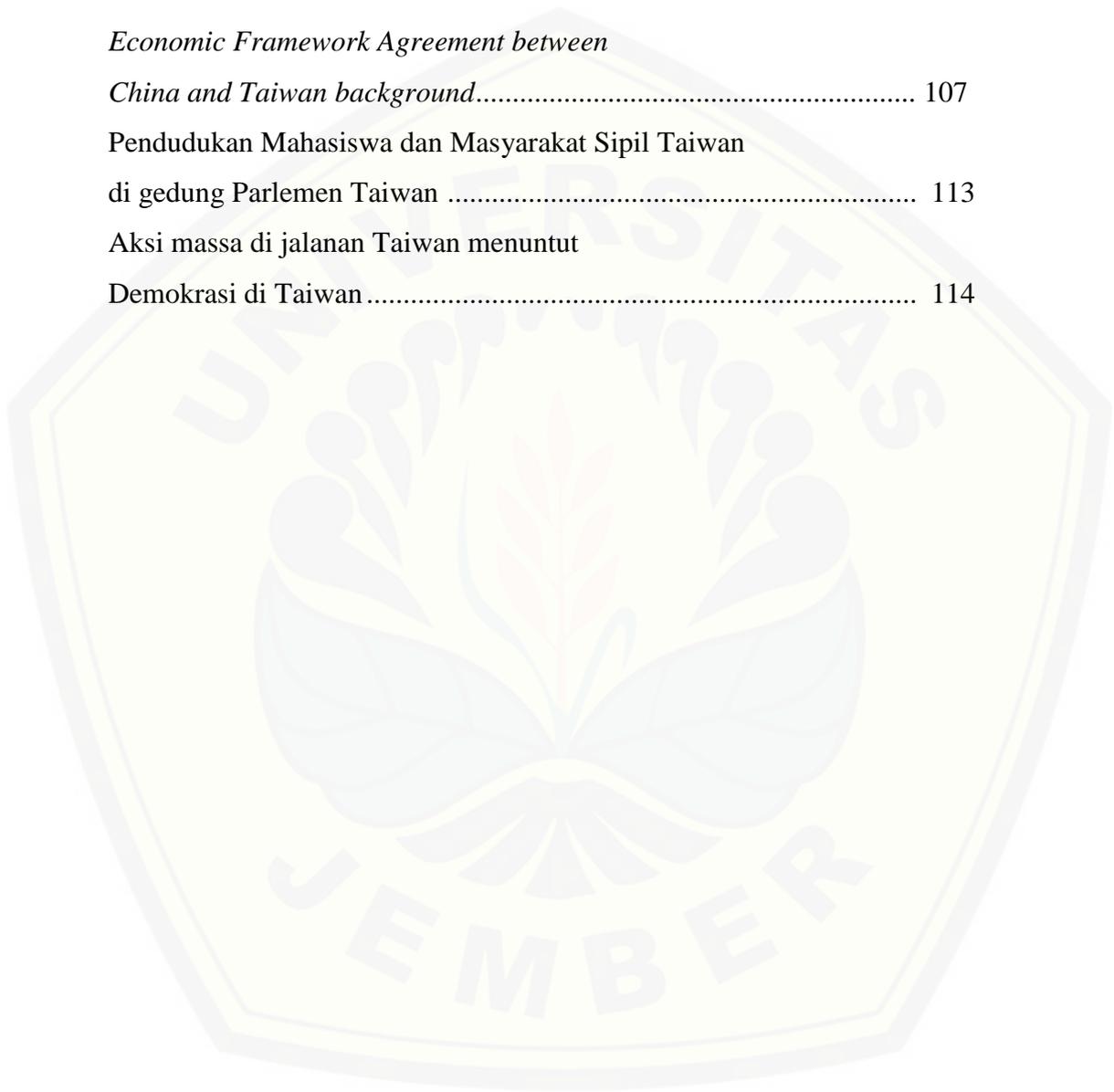
CSSTA	= <i>Cross Strait Service Trade Agreement</i>
DPP	= <i>Democratic Progressive Party</i>
ECFA	= <i>Economic Framework Agreement</i>
KMT	= Koumintang
RRC	= Republik Rakyat China
WTO	= <i>World Trade Organization</i>
QFII	= <i>Qualified Foreign Institutional Investors</i>



LAMPIRAN

Halaman

<i>Economic Framework Agreement between China and Taiwan background.....</i>	107
Pendudukan Mahasiswa dan Masyarakat Sipil Taiwan di gedung Parlemen Taiwan	113
Aksi massa di jalanan Taiwan menuntut Demokrasi di Taiwan	114



BAB 1.

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Fenomena di dalam studi Ilmu Hubungan Internasional saat ini sudah berkembang sangat pesat. Dinamika di dalam Hubungan Internasional tersebut tidak hanya terfokus pada fenomena-fenomena tradisional saja. Banyak hal yang dapat dikaji dalam studi Ilmu Hubungan Internasional. Tidak hanya konflik, fenomena lain seperti isu diplomasi, perjanjian internasional, budaya yang terjadi di berbagai Negara juga sangat mungkin dikaji. Seperti fenomena munculnya gerakan sosial yang ada di Taiwan tahun 2014. Munculnya gerakan social ini sangat menarik untuk dikaji. Mulai dari kondisi masyarakat di Taiwan, kondisi sosial, ekonomi dan politik, sejarah berdirinya Taiwan serta faktor-faktor apa saja yang menjadi pemicu munculnya gerakan tersebut.

Taiwan sendiri merupakan salah satu negara di Asia yang menerapkan sistem ekonomi – politik korporatis dan seiring berjalannya waktu menjadi negara yang kaya. Struktur perekonomian Taiwan berpusat pada industri kecil dan menengah yang bersaing secara kuat untuk menghasilkan produk-produk unggulan yang efisien sehingga dapat bersaing di tingkat internasional. Kegiatan Ekspor – Impor merupakan tonggak perekonomian Taiwan sehingga hal ini menjadi faktor pertumbuhan ekonomi Taiwan. Namun ekspor ini tetap bergantung pada rezim perdagangan terbuka dan tetap rawan terhadap penurunan ekonomi dunia. Korporasi Taiwan bersifat responsif terhadap kepentingan kelompok kecil dan menengah dalam masyarakat. Pemerintah Taiwan memperhitungkan struktur masyarakat yang lebih egaliter terkait faktor geopolitik dengan pemerintah China yang rawan instabilitas.¹

¹ Perwira, Putri. 2012. Perkembangan Ekonomi dan Politik Taiwan-cieloveu. Dalam http://putrinyaperwira-fisip09.web.unair.ac.id/artikel_detail-64071-Masyarakat%20Budaya%20dan%20Politik%20Asia%20Timur-Perkembangan%20Ekonomi%20dan%20Politik%20Taiwan.html diakses pada 8 Juni 2016

Keterbatasan sumber daya alam dan kepadatan penduduk yang tinggi semakin menengaskan bahwa Taiwan tidak dapat mandiri. Oleh karena itu, perdagangan luar negeri memainkan peran utama dalam pembangunan ekonomi Taiwan. Taiwan memiliki ekonomi kapitalis yang dinamis dengan panduan investasi dan perdagangan asing oleh pemerintah yang terus berkurang. Privatisasi berbagai bank dan perusahaan industri dilakukan untuk mendorong upaya ini. Taiwan sekarang ini merupakan negara kreditor, yang memegang salah satu persediaan mata uang asing terbesar di dunia.²

Taiwan dengan statusnya yang unik tak dapat dipungkiri merupakan salah satu negara yang paling demokratis di Asia Timur saat ini. Taiwan memiliki sistem politik yang berbeda dengan sistem politik di RRC, menggunakan asas demokrasi dan liberalisme yang umum digunakan negara-negara barat. Pasca kekalahan perang dengan komunis di Cina daratan, Chiang Kai-sek³ menetapkan Partai Nasionalis Kuomintang (KMT)⁴ sebagai satu-satunya partai di Taiwan, dengan implikasi pada pembatasan kegiatan pers, politik dan pembungkaman kaum oposisi. Pemerintahan selanjutnya berupaya mewujudkan aspirasi rakyat melalui kebebasan pers dan politik, serta kebebasan mengemukakan pendapat di muka umum. Ketika masa pemerintahan dipegang oleh Lee Teng Hui⁵, Taiwan mengalami pergolakan hubungan dengan RRC setelah diwacanakannya kemerdekaan bagi Taiwan dengan nama Taiwan, bukan Republik Cina. Chen Shui-bian⁶ merealisasikan wacana ini melalui penggalangan dukungan

² *Ibid*

³ Seorang pengikut Dr. Sun Yat Sen yang merupakan tokoh Partai Nasionalis Cina yang paling terkenal. Chiang Kai-Shek beralih menggantikan posisi Sun Yat Sen sebagai pemimpin partai setelah Sun Yat Sen meninggal dunia.

⁴ Partai politik tertua dalam sejarah modern Tiongkok. Partai ini didirikan oleh Sun Yat-sen dengan tujuan revolusi melawan Kekaisaran Qing dan mendirikan Republik Tiongkok demi adanya pembaruan di Tiongkok.

⁵ Politikus Republik Tiongkok (ROC). Ia tampil sebagai Presiden Republik China dan Ketua Kuomintang (KMT) pada periode 1988 - 2000.

⁶ Politisi dan Pengacara di Taiwan dan menjabat sebagai Presiden Taiwan sejak tahun 2000 hingga 2008

internasional agar Taiwan menjadi anggota PBB dengan alasan kekuatan ekonomi dan keberadaannya secara *de facto*.⁷

Di bidang ekonomi, program strategi pembangunan ekonomi Taiwan yang fundamental berlangsung sejak tahun 1952 hingga tahun 1999. Periode ini merupakan masa peralihan dari masyarakat yang berbasis agrikultur (meliputi persawahan, peternakan, perikanan dan kehutanan) menjadi masyarakat yang berbasis industri. Perencanaan program strategi pembangunan ini dibagi menjadi tiga fase dimana setiap fasenya pemerintah memformulasikan perencanaan ekonomi dan atau politik yang disesuaikan dengan tren kebutuhan domestik dan internasional bagi kesejahteraan rakyatnya.⁸ Peranan kelompok-kelompok masyarakat sipil juga sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Taiwan. Beberapa gerakan juga terjadi di Taiwan terkait dengan gejolak pertumbuhan ekonomi. Salah satu gerakan massa yang menjadi pra-syarat pembangunan ekonomi yaitu gerakan reformasi lahan (Land Reform). Gerakan ini cukup memberikan andil yang besar kepada distribusi pembangunan ekonomi domestik yang tersebar merata dan mendukung sebuah hipotesa yang dibuat Morawetz.⁹ yang mengatakan bahwa : "*Kondisi distribusi aktivia dan pendapatan awal dapat menjadi determinan penting bagi tren pemerataan*".

Gerakan Reformasi Lahan ini merupakan salah satu Pra-syarat Pembangunan ekonomi Taiwan. Pada tahun 1949, bersamaan dengan datangnya Amerika Serikat sebagai negara sentral maka Chian Kai-Shek memulai gerakan *Land Reform* yang didukung penuh oleh pemerintah Amerika, dengan tujuan untuk mengembalikan fungsi dan penggunaan tanah sebaik-baiknya dan untuk

⁷ *Ibid*

⁸ Ucup, Supriyadi. 2008. *Proses Keberhasilan Ekonomi Taiwan*. FISIP UI. Diakses dalam <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/116270-T%2024377-Fenomena%20keberhasilan-Literatur.pdf> pada 29 oktober 2016

⁹ Helen Hughes, *op.cit.* Hal.25

meningkatkan pendapatan para petani sehingga mampu mempersempit kesenjangan pendapatan antara petani dan tuan tanah.¹⁰

Peranan kelompok-kelompok masyarakat dan atau kelompok-kelompok kepentingan yang ada di Taiwan membawa kontribusi yang cukup besar dalam perkembangan dan pertumbuhan ekonomi Taiwan. Seperti halnya gerakan reformasi lahan, dimana kelompok-kelompok elit sebagai penguasa wilayah setempat mampu menjadikan program reformasi lahan ini menjadi lancar. Dibentuknya Asosiasi industri dan Perdagangan Nasional Taiwan dengan peran sebagai jalur komunikasi dan sosialisasi program-program pembangunan pemerintah pusat kepada kelompok-kelompok dunia usaha dan Modernisasi Industri Pertanian yang melibatkan kelompok tani di Taiwan juga menjadi salah satu program kerja pemerintah Taiwan untuk meningkatkan ekonomi Taiwan.

Faktor lain yang banyak mempengaruhi keberhasilan pembangunan ekonomi, sosial dan politik di Taiwan adalah karena adanya faktor budaya atau paham *Confucian* yang secara umum terjadi pada masyarakat khususnya Asia Timur.¹¹ Menurut Cummings, kesuksesan Taiwan¹² dapat dikaji dari aspek adanya pola hubungan kuat antara sektor pemerintahan dengan perusahaan swasta yang menggunakan semangat *Confucian*¹³ sebagai tradisi. Di mana pola hubungan tersebut sangat kuat di tiga Negara Asia Timur yaitu: Taiwan, Jepang dan Korea Selatan.

¹⁰ Ucup, Supriyadi. 2008. *Proses Keberhasilan Ekonomi Taiwan*. FISIP UI. Diakses dalam <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/116270-T%2024377-Fenomena%20keberhasilan-Literatur.pdf> pada 29 oktober 2016

¹¹ *Ibid.* hal 48-49

¹² Cumming B. 1984. *The Origin and Development of the Northeast Asian Political Economy : Industrial Sectors, Product cycles and political consequences, Internasional Organization* dalam <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/116270-T%2024377-Fenomena%20keberhasilan-Literatur.pdf> diakses pada 15 Juni 2016

¹³ Confucian bukanlah agama yang menekankan pada kehidupan di akhirat melainkan merupakan aturan etika dan tingkah laku, yang dimaksudkan sebagai pedoman terhadap pola hubungan antar umat manusia. Hubungan yang teramat penting adalah bersifat hirarkis, yakni antar generasi, dalam lingkup keluarga ataupun antara penguasa dan rakyat jelata. Kewajiban bawahan dalam pola *Confucian* ini adalah memperlihatkan sikap patuh, loyalitas dan rasa hormat, sementara kewajiban atasan adalah memberikan teladan moral yang baik dan bertingkah laku sesuai dengan statusnya dalam masyarakat. Dalam pola hubungan *Confucian* ini sikap saling pengertian yang dimiliki masyarakat perihal tujuan dan cita-cita bersama meniadakan kebutuhan akan pola komunikasi yang bersifat terbuka.

Sementara itu, beberapa tahun terakhir, Presiden China Xi Jinping dan Presiden Taiwan Ma Ying Jeou akan bertemu untuk pertama kalinya sejak kedua Negara berpisah lebih dari 60 tahun. Hal ini dimulai sejak Presiden Ma Ying Jeou mulai membuka diri dengan China melalui perjanjian bilateral. Salah satu bentuk perjanjian antara kedua Negara yaitu Perjanjian Perdagangan Lintas Selat atau yang disebut *Cross Strait Service Trade Agreement (CSSTA)*. CSSTA itu sendiri merupakan salah satu tindak lanjut perjanjian dibawah kerangka perjanjian perdagangan lintas selat atau yang disebut *Economic Cross Framework Agreement (ECFA)*. Kesepakatan CSSTA membahas dan menetapkan hal yang dapat mengurangi atau menghilangkan pembatasan pada perdagangan lintas selat China-Taiwan. Ini akan membantu bisnis lokal untuk memperluas pangsa pasar China daratan dan berkontribusi dalam perekonomian Taiwan.¹⁴

Perjanjian CSSTA ini mencakup 3 bagian penting yaitu: Isi Perjanjian, Komitmen terkait jadwal perdagangan lintas selat dan layanan-layanan khusus pemasok. Isi perjanjian tersebut berisi kewajiban kedua belah pihak harus sesuai. Perjanjian ini menetapkan aturan mengenai masalah-masalah yang mempengaruhi layanan perdagangan seperti transparansi, administrasi langkah-langkah peraturan, pencegahan persaingan tidak sehat, mekanisme darurat negosiasi, pergerakan bebas pembayaran dan transfer modal, prinsip perlakuan perjanjian.

Namun sepertinya langkah yang ditempuh oleh kedua negara untuk memperbaiki hubungan lewat perjanjian perdagangan ini mengalami hambatan. Pasalnya dengan adanya perjanjian lintas selat antara Taiwan dan China justru memicu aksi protes dari kalangan masyarakat sipil Taiwan sendiri. Pada tahun 2014, masyarakat sipil Taiwan memprotes perjanjian CSSTA tersebut dan menuntut pemerintah Taiwan untuk mengkaji ulang perjanjian tersebut. Di nilai kurang berdampak baik untuk perekonomian Taiwan, kelompok massa yang terdiri dari mahasiswa, akademisi dan masyarakat sipil Taiwan membentuk sebuah gerakan massa yang disebut *Sunflower Movement*. Gerakan massa ini menuntut agar pemerintah Taiwan membatalkan ratifikasi perjanjian CSSTA

¹⁴ *Ibid*

dengan China. *Sunflower Movement* ini merupakan gerakan massa terbesar dan terlama sepanjang sejarah berdirinya Taiwan. Aksi gerakan tersebut salah satunya yakni menduduki gedung parlemen di Taiwan sebagai aksi nyata agar tuntutan mereka didengar oleh pemerintah.¹⁵

Gerakan sosial dibentuk oleh masyarakat sipil Taiwan untuk menghalangi pemerintah melakukan ratifikasi perjanjian lintas selat antar china dan Taiwan yang memfokuskan pada beberapa sektor ekspor – impor kedua negara. Perjanjian lintas selat atau yang sering disebut dengan istilah CSSTA (*Cross Strait Service Trade Agreement*) merupakan perjanjian yang dianggap kontroversial sehingga memicu masyarakat sipil untuk bergerak membentuk suatu gerakan yang menuntut pemerintah Taiwan untuk mengkaji kembali isi perjanjian tersebut. Perjanjian CSSTA dianggap memiliki isi perjanjian yang tidak sesuai dengan perekonomian Taiwan dan proses peninjauan serta ratifikasi yang dianggap tidak demokratis menjadi agenda tuntutan masyarakat sipil Taiwan.

1.2 Ruang Lingkup Permasalahan

Dalam suatu penulisan karya ilmiah, ruang lingkup pembahasan diperlukan untuk memberikan batasan agar pembahasan masalah berkembang kearah yang tepat dan tidak keluar dari kerangka permasalahan yang telah ditentukan.

Menurut Sutrisno Hadi: “Sekali suatu persoalan telah ditetapkan maka langkah berikutnya adalah membatasi luasnya dan memberikan formulasi-formulasi yang tegas terhadap pokok permasalahan tersebut. Bagi penyelidik sendiri, pemberian batasan-batasan ini akan menjadi pedoman kerja, sedangkan bagi orang lain kepada laporan penelitian ini hendak disajikan atau diserahkan, penegasan selalu berfungsi untuk mencegah kekaburan wilayah persoalan”.¹⁶

¹⁵ Ming-sho, Ho. *Gerakan Bunga Matahari dan Sosiologi Siap Tempur di Taiwan*. Universitas Nasional Taiwan, Taiwan . Diakses dalam <http://isa-global-dialogue.net/wp-content/uploads/2015/12/v5i4-indonesian.pdf> pada 12 Juni 2016

¹⁶ Sutrisno Hadi. 1989. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offset

Oleh sebab itu, agar pembahasan bisa lebih fokus pada kajian yang dianalisis maka penulis membatasi karya tulis ini melalui batasan materi dan batasan waktu untuk memudahkan penulis dalam menganalisis data yang ada.

1.2.1 Batasan Materi

Batasan materi dalam penulisan karya ilmiah diperlukan untuk menunjukkan ruang pembahasan sebuah peristiwa atau objek yang dianalisis, yaitu cakupan kawasan atau objek studinya. Batasan dan pokok bahasan dalam tulisan ini adalah berkisar pada perumusan perjanjian dagang antara China dan Taiwan sampai pada terbentuknya *sunflower movement* di Taiwan.

1.2.2. Batasan Waktu

Batasan waktu yang diperlukan untuk mengetahui rentang waktu kapan materi kajian ini berlangsung dan untuk membatasi jangka waktu permasalahan yang diteliti. Penulis memberikan batasan waktu pada tahun 2010 pada saat perjanjian dagang antara China dan Taiwan disepakati sampai 2014 pada saat *sunflower movement* muncul.

1.3. Rumusan Masalah

Perumusan masalah dimaksudkan agar dapat segera menemukan pemecahan masalah, sehingga dengan demikian pembahasan masalah akan tepat pada sasaran. Masalah adalah bagian bagian pokok dari suatu kegiatan penelitian, dimana penulis mengajukan pertanyaan tentang persoalan terhadap hal-hal yang dicari melalui kegiatan penelitian.¹⁷

Menurut Hadar Nawawi, masalah muncul karena tidak terdapat keseimbangan antara sesuatu yang diharapkan, *das sollen*, berdasarkan teori-teori atau hukum yang menjadi tolak ukur dengan kenyataan, *das sien*, sehingga menimbulkan pertanyaan: mengapa dan apa sebabnya demikian? Disamping itu

¹⁷ Suharsini Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Bina Aksara. 1986. Jakarta. Hal. 47

masalah juga dapat muncul karena keragu-raguan tentang keadaan sesuatu, sehingga ingin diketahui secara mendalam secara objektif.¹⁸

Dari latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang hendak penulis fokuskan dalam skripsi ini adalah

“Mengapa terjadi Sunflower Movement di Taiwan tahun 2014?”

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam karya tulis ilmiah ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya gerakan massa di Taiwan pada tahun 2014 yang diberi nama dengan sebutan *Sunflower Movement* dan mengetahui tujuan-tujuan apa saja yang hendak dicapai oleh masyarakat sipil Taiwan serta tuntutan mereka kepada pemerintah. Hal ini karena salah satu faktor penyebab munculnya gerakan massa ini adalah terkait beberapa tuntutan masyarakat sipil di Taiwan yaitu pembatalan Pakta Perdagangan Antara Taiwan dan RRC serta beberapa faktor lain yang menjadi tuntutan masyarakat sipil Taiwan yang akan dijabarkan di bab selanjutnya serta untuk mengetahui mengapa *Cross Strait Service Trade Agreement* antara Pemerintah China dan Taiwan menjadi faktor penentu terjadinya gerakan massa ini.

1.5. Kerangka Pemikiran

Dalam melakukan penelitian, penulis tentu memerlukan kerangka pemikiran untuk bisa menganalisis suatu fenomena agar terfokus dan tidak terlalu melebar. Hal ini juga bertujuan untuk memudahkan pembaca dalam memahami suatu kasus dan penerapannya dengan suatu kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran merupakan konsep, paradigma, pendapat ahli ataupun beberapa teori yang dirangkai dengan baik dan sistematis sehingga membentuk suatu pola pikir peneliti agar dapat menganalisis suatu fenomena dengan lebih mudah dan

¹⁸ Hadar Nawawi. 1991. *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajahmada University Press. Hal 23

mendapatkan kesimpulan yang sesuai. Dalam penelitian ini terdapat beberapa teori yang dapat menjelaskan fenomena yang akan dibahas dalam skripsi ini.

Dalam disiplin ilmu sosial terdapat beberapa teori yang menjelaskan tentang gerakan sosial baru. Untuk menjelaskan fenomena dan menjawab permasalahan dalam tulisan ini, penulis menggunakan Teori Mobilisasi Sumberdaya (*The Resource Mobilization Theory*) dan Teori Partisipasi Politik dimana teori ini cukup dominan untuk menganalisis fenomena gerakan sosial dan tindakan kolektif.¹⁹ Teori diartikan sebagai bentuk pernyataan yang menjawab pertanyaan mengapa; artinya berteori adalah upaya memberi makna pada fenomena yang terjadi.²⁰ Oleh karena itu untuk menganalisis fenomena gerakan sosial *Sunflower Movement* yang muncul di Taiwan, penulis menggunakan kerangka pemikiran, yakni;

1.5.1 Teori Partisipasi Politik (*The Politic Participation Theory*)

a. Pengertian partisipasi politik

Partisipasi menjadi salah satu prinsip mendasar dari good government, sehingga banyak kalangan menempatkan partisipasi sebagai strategi awal dalam mengawali reformasi 1998. Partisipasi berasal dari bahasa latin yaitu pars yang artinya bagian dan capere yang artinya mengambil peranan dalam aktivitas atau kegiatan politik negara. Apabila digabungkan berarti “mengambil bagian”. Dalam bahasa inggris, partipate atau participation berarti mengambil bagian atau peranan. Jadi partisipasi berarti mengambil peranan dalam aktivitas atau kegiatan politik negara. Partisipasi politik adalah salah satu aspek penting suatu demokrasi.

Partisipasi politik merupakan ciri khas dari modernisasi politik. Adanya keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga negara, maka warga negara berhak ikut serta menentukan isi keputusan politik. Oleh karena itu yang dimaksud dengan

¹⁹ Buechler, Steven M. 1995. “*New Social Movement Theories. The Sociological Quarterly*”, Vol. 36, No. 3 (Summer, 1995) Dalam *Sosiologi Reflektif*, Volume 8, No. 1, Oktober 2013. Diakses <http://ejournal.uin-suka.ac.id/index.php/sosiologirefleksif/article/view/524/465> Pada 30 Mei 2016

²⁰ Mohtar Mas’oed. 1990. *Ilmu Hubungan Internasional, Disiplin dan Metodologi*. Jakarta: LP3ases.

partisipasi politik menurut Huntington dan Nelson yang dikutip oleh Cholisin adalah kegiatan warga Negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Selanjutnya Ramlan Surbakti sebagaimana yang dikutip oleh Cholisin memberikan definisi singkat mengenai partisipasi politik sebagai bentuk keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya.²¹

Menurut Miriam Budiarjo²², menyatakan bahwa partisipasi politik secara umum dapat didefinisikan sebagai kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pemimpin Negara dan langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan publik (*public policy*). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan (*contacting*) dengan pejabat pemerintah atau anggota perlemen, dan sebagainya. Oleh sebab itu, di negara-negara demokrasi pada umumnya dianggap bahwa partisipasi masyarakatnya lebih banyak, maka akan lebih baik.

Dalam implementasinya tingginya tingkat partisipasi menunjukkan bahwa warga negara mengikuti dan memahami masalah politik dan ingin melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan itu. Sebaliknya, tingkat partisipasi yang rendah pada umumnya dianggap sebagai tanda yang kurang baik, karena dapat ditafsirkan bahwa banyak warga tidak menaruh perhatian terhadap masalah kenegaraan. Ahli yang lain juga menyebutkan pengertian partisipasi politik:

- 1) Keith Fauls Keith Fauls, memberikan definisi partisipasi politik sebagai keterlibatan secara aktif (*the active engagement*) dari individu atau kelompok ke dalam proses pemerintahan. Keterlibatan ini mencakup keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan maupun berlaku oposisi terhadap pemerintah.
- 2) Herbert McClosky dalam *International Encyclopedia of the Social Sciences* Herbert McClosky, memberikan definisi partisipasi politik sebagai kegiatan-

²¹ <http://eprints.uny.ac.id/23755/4/4.BAB%20II.pdf> diakses pada 7 Desember 2016

²² *Ibid*

kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum.

3) Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson dalam *No Easy Choice: Political Participation in Developing Countries* Huntington dan Nelson partisipasi politik sebagai Kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud sebagai pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau secara damai atau kekerasan, legal atau illegal, efektif atau tidak efektif.

Dari pendapat yang dikemukakan oleh para ahli di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa partisipasi politik adalah hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan seseorang atau sekelompok orang dalam hal penentuan atau pengambilan kebijakan pemerintah baik itu dalam hal pemilihan pemimpin ataupun penentuan sikap terhadap kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah untuk di jalankan, yang dilakukan secara langsung atau tidak langsung dengan cara konvensional ataupun dengan cara non konvensional atau bahkan dengan kekerasan (*violence*)

b. Faktor-faktor Partisipasi Politik

Partisipasi politik merupakan suatu aktivitas tentu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Menurut Ramlan Surbakti menyebutkan dua variable penting yang mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat partisipasi politik seseorang. Pertama, aspek kesadaran politik terhadap pemerintah (sistem politik). Yang dimaksud dalam kesadaran politik adalah kesadaran hak dan kewajiban warga negara. Misalnya hak politik, hak ekonomi, hak perlindungan hukum, kewajiban ekonomi, kewajiban sosial dll. Kedua, menyangkut bagaimana penilaian serta apresiasi terhadap kebijakan pemerintah dan pelaksanaan pemerintahnya. Selain itu ada faktor yang berdiri sendiri (bukan variable independen). Artinya bahwa kedua faktor itu dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, seperti status sosial, afiliasi politik orang tua, dan pengalaman berorganisasi. Yang dimaksud status sosial yaitu kedudukan seseorang berdasarkan keturunan, pendidikan, pekerjaan, dan lain-lain. Selanjutnya status ekonomi yaitu kedudukan seseorang dalam lapisan masyarakat,

berdasarkan pemilikan kekayaan. Seseorang yang mempunyai status sosial dan ekonomi tinggi diperkirakan tidak hanya mempunyai pengetahuan politik, akan tetapi memiliki minat serta perhatian pada politik dan kepercayaan terhadap pemerintah.²³

Berbagai bentuk-bentuk partisipasi politik yang terjadi di berbagai Negara dapat dibedakan dalam kegiatan politik yang berbentuk konvensional dan nonkonvensional termasuk yang mungkin legal (petisi) maupun ilegal (cara kekerasan atau revolusi). Bentuk-bentuk dan frekuensi partisipasi politik dapat dipakai sebagai ukuran untuk menilai stabilitas sistem politik, integritas kehidupan politik, kepuasan atau ketidakpuasan warga negara. Bentuk-bentuk partisipasi politik yang dikemukakan oleh Almond yang dikutip oleh Mohtar Mas'ood yang terbagai dalam dua bentuk yaitu partisipasi politik konvensional dan partisipasi politik non konvensional.

Adapun rincian bentuk partisipasi politik konvensional dan non konvensional. 1) Partisipasi politik konvensional;

- a) Pemberian suara atau voting
- b) Diskusi politik
- c) Kegiatan kampanye
- d) Membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan
- e) Komunikasi individual dengan pejabat politik atau administratif

2) Partisipasi politik nonkonvensional;

- a) Pengajuan petisi
- b) Berdemonstrasi
- c) Konfrontasi
- d) Mogok
- e) Tindak kekerasan politik terhadap harta benda : pengrusakan, pemboman, pembakaran
- f) Tindakan kekerasan politik terhadap manusia: penculikan, pembunuhan, perang gerilya, revolusi.²⁴

²³ <http://eprints.uny.ac.id/23755/4/4.BAB%20II.pdf> diakses pada 7 Desember 2016

²⁴ *Ibid.* Hal 29

1.5.2 Teori Mobilisasi Sumberdaya (*The Resource Mobilization Theory*)

Dalam fenomena banyaknya gerakan sosial dewasa ini, teori ini dapat dikatakan dominan dalam menganalisis beberapa gerakan sosial yang muncul di berbagai negara di dunia serta untuk menganalisis perilaku kolektif dari gerakan tersebut.²⁵ Para teoritis mobilisasi sumberdaya memulai analisa mereka terkait gerakan sosial dengan penolakan atas perhatian terhadap peran dari perasaan (*feelings*) dan ketidakpuasan (*grievances*), serta penggunaan kategori psikologis dalam memahami gerakan sosial baru (*New Sosial Movement*).²⁶ Sama halnya dengan yang diutarakan Cohen, Zurcher dan Snow dalam Klandermas (1984) menyatakan bahwa *Resource Mobilization Theory* (RMT) merupakan reaksi atas pandangan tradisional dari teori-teori psikologi sosial tentang gerakan sosial.

Pada umumnya para teoritis akan mengkaji partisipasi orang-orang dalam suatu gerakan atas dasar sifat-sifat kepribadian (*personality traits*), marginalisasi dan keterasingan (*marginality and alienation*), serta ketidakpuasan dan ideologi (*grievances and ideology*).²⁷ Teori Mobilisasi Sumberdaya pertama kali diperkenalkan oleh Anthony Oberschall. Oberschall mengkritik *Mass Society Theory* yang dikembangkan oleh Kornhauser, dimana pada waktu itu teori yang dikemukakan oleh Kornhauser merupakan teori yang sangat dominan untuk mengkaji dan menganalisis gerakan sosial. Menurut Oberschall, *Mass Society Theory* tidak signifikan dan tidak cukup mampu untuk menjelaskan apa yang

²⁵ Buechler, Steven M. *New Social Movement Theories*. *The Sociological Quarterly*, Vol. 36, No. 3 (Summer, 1995), p. 441-464. Dalam *Sosiologi Reflektif*, Volume 8, No. 1, Oktober 2013. Diakses <http://ejournal.uin-suka.ac.id/index.php/sosiologirefleksif/article/view/524/465> Pada 30 Mei 2016

²⁶ Singh, Rajendra. *Social Movements, Old and New: A Post-Modernist Critique*. New Delhi: SAGE publications India, Ltd. 2001. Dalam *Sosiologi Reflektif*, Volume 8, No. 1, Oktober 2013. Diakses <http://ejournal.uin-suka.ac.id/index.php/sosiologirefleksif/article/view/524/465> Pada 30 Mei 2016

²⁷ Klandermans, Bert. *Mobilization and Participation: Social-Psychological Explanation of Resource Mobilization Theory*. *American Sociological Review*, 49 (5): pp. 583-600. 1984. Diakses di <https://investmentosocial.wikispaces.com/file/view/14858682.pdf> pada 30 Mei 2016

sebenarnya terjadi dalam gerakan anti-demokrasi seperti Nazi (*Nazism*) di Jerman.²⁸

Resource Mobilization Theory (RMT), memfokuskan perhatiannya kepada proses-proses sosial yang memungkinkan muncul dan berhasilnya suatu gerakan. *Resource Mobilization Theory* lebih banyak memberikan perhatian terhadap faktor-faktor ekonomi dan politik daripada *Mass Society Theory* atau *Relative Deprivation Theory*, serta kurang memberikan perhatian terhadap sifat-sifat psikologis dari anggota gerakan. Teori ini juga dibangun tidak didasarkan atas asumsi bahwa terdapat motivasi individu ketika bergabung dalam suatu gerakan, dan adanya keterasingan individu (*individual alienation*) dianggap tidak relevan (kurang tepat). *Resource Mobilization Theory* berasumsi bahwa dalam suatu masyarakat dimana muncul ketidakpuasan maka cukup memungkinkan untuk memunculkan sebuah gerakan sosial. Faktor organisasi dan kepemimpinan merupakan faktor yang dapat mendorong atau menghambat suatu gerakan sosial (*social movements*). Menurut Oberschall, istilah mobilisasi adalah suatu tindakan yang mengacu kepada proses pembentukan kerumunan, kelompok, asosiasi, dan organisasi untuk mencapai suatu tujuan kolektif.²⁹

Menurut Klandermans dengan mengutip pendapat Oberschall, Gamson, Marx dan Wood, McCarthy dan Zald, dan Snow, menyatakan bahwa *Resource Mobilization Theory* (RMT) menekankan pada pentingnya faktor-faktor struktural (*structural factors*), seperti ketersediaan sumberdaya (*the availability of resources*) untuk kolektivitas dan posisi individu dalam jaringan sosial, serta menekankan rasionalitas tentang partisipasi dalam suatu gerakan sosial.³⁰ Partisipasi dalam gerakan sosial dipandang bukan sebagai konsekuensi dari sifat-sifat predisposisi

²⁸ Locher, David A. *Collective Behavior*. 2002. New Jersey: Prentice Hall. Diakses di <http://www.u.arizona.edu/~jeremiah/Soc%20313%20Syllabus%20Spring%202008.doc> Pada 30 Mei 2016

²⁹ Locher, David A. *Collective Behavior*. 2002. New Jersey: Prentice Hall. Dalam Sosiologi Reflektif, Volume 8, No. 1, Oktober 2013. Diakses <http://ejournal.uin-suka.ac.id/index.php/sosiologirefleksif/article/view/524/465> Pada 30 Mei 2016

³⁰ Klandermans, Bert. 1984. *Mobilization and Participation: Social-Psychological*. Dalam Sosiologi Reflektif, Volume 8, No. 1, Oktober 2013. Diakses <http://ejournal.uin-suka.ac.id/index.php/sosiologirefleksif/article/view/524/465> Pada 30 Mei 2016

psikologis, tetapi sebagai hasil proses-proses keputusan rasional dimana orang melakukan pertimbangan untung dan rugi (*reward and cost*) atas keterlibatannya dalam suatu gerakan sosial. Sejalan dengan pandangan Klandermans, selanjutnya Waterman dalam Pichardo (1988), menyatakan bahwa mobilisasi sumberdaya (*resource mobilization*) pada dasarnya suatu teori yang mengkaji rasionalitas dari perilaku gerakan sosial.³¹ Menurut Fireman dan Gamson dalam Pichardo (1988), esensi dari *Resource Mobilization Theory* (RMT) adalah upaya untuk mencari basis rasionalitas tentang bentuk dan partisipasi dalam suatu gerakan sosial.³²

Beberapa teoritis telah melakukan kajian untuk memahami basis rasionalitas partisipasi dalam suatu gerakan sosial. Misalnya Olson dalam Pichardo (1988) mengembangkan model utilitarian untuk menjelaskan partisipasi perilaku kolektif dan menyatakan bahwa untuk dapat memahami mengapa individu terlibat dalam suatu perilaku kolektif maka harus dianalisis tentang konsep imbalan dan biaya (*reward and cost*) yang dialami oleh individu tersebut.³³ Berbagai bentuk biaya (*cost*) yang dihubungkan dengan partisipasi dalam aktivitas kolektif meliputi antara lain: waktu (*time*), uang (*money*), keamanan personal (*personal safety*), dan hilangnya pekerjaan (*loss of job*). Olson berpendapat bahwa aktivitas kolektif harus mampu menawarkan pilihan insentif, seperti prestise (*prestige*), gaji (*salary*), dan kepemimpinan (*leadership*) untuk menarik partisipasi masyarakat dalam suatu aktivitas kolektif.

Sementara Oberschall, McCarthy dan Zald, Gamson, dan Tilly dalam Pichardo (1988) mengkaji berbagai elemen yang diperlukan dalam suatu gerakan dan bagaimana proses dari elemen-elemen ini (khususnya sumberdaya) dimobilisasi untuk digunakan dalam suatu gerakan.³⁴ Pendekatan ini mengkonsentrasikan pada isolasi dan pemahaman atas kekuatan-kekuatan yang

³¹ Pichardo, Nelson A. *Resource Mobilization: An Analysis of Conflicting Theoretical Variations*. *The Sociological Quarterly*, Vol. 29, No. 1 (Spring, 1988), pp. 97-110. 1988. Dalam Sosiologi Reflektif, Volume 8, No. 1, Oktober 2013. Diakses <http://ejournal.uin-suka.ac.id/index.php/sosiologireflektif/article/view/524/465> Pada 30 Mei 2016

³² *Ibid*

³³ Pichardo, Nelson A. *Resource Mobilization: An Analysis of Conflicting Theoretical Variations*. *The Sociological Quarterly*, Vol. 29, No. 1 (Spring, 1988), pp. 97-110. Dalam Sosiologi Reflektif, Volume 8, No. 1, Oktober 2013. Diakses <http://ejournal.uin-suka.ac.id/index.php/sosiologireflektif/article/view/524/465> Pada 30 Mei 2016

³⁴ *Ibid*

berkontribusi terhadap munculnya gerakan sosial, khususnya persyaratan fisik dan lingkungan yang dapat mempengaruhi perkembangan dan perilaku gerakan. Konsep ini merupakan dasar bagi lahirnya teori mobilisasi sumberdaya (*the resource mobilization theory*) tentang gerakan sosial.

Secara umum model ini berpandangan bahwa keberadaan struktur pemerintah menentukan akses kelompok terhadap sumberdaya masyarakat.³⁵

Selanjutnya terdapat dua model analisis dalam pendekatan Resource Mobilization Theory menurut Pichardo, (1988) dan Triwibowo, (2006), yakni:³⁶

- a) Pertama; *The Political-interactive model* (The Political process models). Model ini dikembangkan oleh Tilly, Gamson, Oberschall dan McAdam. Model ini lebih menekankan pentingnya perubahan struktur kesempatan bagi aksi kolektif, keberadaan jejaring (*network*), serta kaitan horizontal yang telah terbangun dengan kelompok-kelompok tertindas (*aggrieved groups*) sebagai faktor penentu keberhasilan gerakan sosial. Model ini menempatkan relasi gerakan sosial dengan negara dan bingkai sistem politik yang ada sebagai determinan yang penting bagi keberhasilan gerakan sosial. Jika negara kuat dan represif, maka gerakan sosial sulit untuk mencapai tujuannya, demikian juga sebaliknya. Pichardo (1988), menjelaskan bahwa model ini menekankan pada kapasitas internal dari komunitas untuk menghasilkan organisasi gerakan sosial.³⁷
- b) Kedua; *The Organizational-entrepreneurial model* (The Professional organizer models). Model ini dikembangkan oleh McCarthy dan Zald. Model ini memandang bahwa dinamika organisasional, kepemimpinan dan pengelolaan sumberdaya merupakan faktor yang lebih signifikan dalam menentukan keberhasilan gerakan sosial. Model ini pada dasarnya mengaplikasikan teori pengembangan organisasi untuk

³⁵ *Ibid*

³⁶ Pichardo, Nelson A. *Resource Mobilization: An Analysis of Conflicting Theoretical Variations*. *The Sociological Quarterly*, Vol. 29, No. 1 (Spring, 1988), pp. 97-110. Dalam Dalam Sosiologi Reflektif, Volume 8, No. 1, Oktober 2013. Diakses <http://ejournal.uin-suka.ac.id/index.php/sosiologirefleksif/article/view/524/465> Pada 30 Mei 2016

³⁷ *Op. Cit.*

menganalisis gerakan sosial serta memandang bahwa organisasi formal merupakan *carriers of social movements*. Organisasi gerakan sosial adalah suatu organisasi yang kompleks, atau formal, yang mengidentikkan tujuannya dengan preferensi dari gerakan sosial dan berusaha mewujudkan pencapaian tujuan-tujuan tersebut.

Setiap *Social Movement Organization* (SMO) harus mampu mengelola sumber-sumber (*resources*) yang tersedia dengan baik. Sumber-sumber dimaksud meliputi sumber-sumber material, seperti pekerjaan (*jobs*), penghasilan (*incomes*), dan tabungan (*savings*), serta sumber-sumber non-material seperti wewenang (*authority*), komitmen moral (*moral commitment*), kepercayaan (*trust*), persahabatan (*friendship*), kemampuan (*skills*) dan sebagainya. Menurut Oberschall dalam Locher (2002), keberhasilan dan kegagalan sebuah gerakan, tergantung atas seberapa banyak orang-orang yang tergabung ke dalam organisasi, bagaimana mengarahkan mereka, apa pengorbanan mereka, dan bagaimana mereka bertahan terhadap pihak lawan (*opponents*).³⁸ Oberschall dalam Locher (2002), menyatakan bahwa keberadaan kelompok sosial akan lebih memungkinkan untuk memunculkan suatu gerakan sosial jika kelompok sosial tersebut tersegmentasi.³⁹ Karena kelompok sosial yang tersegmentasi akan menarik keanggotaannya dari kelas khusus dalam suatu masyarakat. Semakin tersegmentasi kelompok asosiasi dalam suatu masyarakat, maka semakin besar kemungkinannya untuk dimobilisasi ke dalam *Social Movement Organization* (SMO). Kesamaan keanggotaan dalam suatu kelompok cenderung memiliki kesamaan juga dalam hal keinginan bersama.⁴⁰

Faktor penting mengapa kelompok lebih mudah untuk melakukan mobilisasi karena kelompok memiliki jaringan komunikasi yang sudah mapan (*established*), terdapatnya anggota dengan kemampuan kepemimpinan, dan adanya partisipasi tradisional dari para anggotanya. Selain itu, dalam kelompok juga terdapat pemimpin, anggota, tempat pertemuan, kegiatan rutin, rantai sosial,

³⁸ *Op. Cit.*

³⁹ *Op. Cit.*

⁴⁰ Sukmana, Oman. Sosiologi Reflektif, Volume 8, No. 1, Oktober 2013. <http://ejournal.uin-suka.ac.id/index.php/sosiologireflektif/article/view/524/465> Diakses pada 30 Mei 2016

dan berbagi kepercayaan, simbol serta bahasa yang sama. Seorang pemimpin dalam suatu Organisasi Gerakan Sosial harus memusatkan perhatiannya kepada masalah mobilisasi, hal-hal yang membuat ketidak puasan, pilihan taktis, dan infrastruktur masyarakat dan gerakan yang diperlukan agar suatu gerakan sosial berhasil.⁴¹

Pemimpin (*leaders*) dalam suatu Organisasi Gerakan Sosial, memiliki resiko dan tanggung jawab yang lebih besar daripada para anggotanya, namun mereka juga akan menerima keuntungan yang lebih besar atas keberhasilan suatu gerakan sosial. Pemimpin biasanya akan mendapatkan keuntungan dalam hal status dan wewenang, kadang-kadang juga dalam hal kekayaan, atas posisinya dalam suatu Organisasi Gerakan Sosial. Menurut Morris dan Staggenborg dalam Snow, Soule, & Kriesi menyatakan bahwa para pemimpin (*leaders*) sangat penting dalam gerakan sosial, mereka menginspirasi komitmen, memobilisasi sumber-sumber, menciptakan dan memahami kesempatan-kesempatan, menyusun strategi, membimbing tuntutan tuntutan, dan mempengaruhi hasil-hasil. Pemimpin gerakan (*leaders movement*) didefinisikan sebagai pembuat keputusan strategis (*strategic decision-makers*) yang menginspirasi dan mengorganisasi orang lain untuk berpartisipasi dalam gerakan sosial.⁴²

1.6. Argumen Utama

Gerakan *Sunflower Movement* di Taiwan pada tahun 2014 terjadi karena adanya penolakan terhadap diratifikasinya perjanjian CSSTA antara China dan Taiwan yang dinilai masyarakat Taiwan lebih banyak merugikan perekonomian Taiwan serta ada beberapa faktor partisipasi politik yang mendorong munculnya gerakan ini seperti tidak transparannya proses ratifikasi perjanjian CSSTA dan menurut masyarakat sipil Taiwan hal tersebut merupakan kemunduruan dari proses demokratisasi yang ada di Taiwan.

⁴¹ Triwibowo, Darmawan. *Gerakan Sosial: Wahana Civil Society bagi Demokratisasi*. 2006. Jakarta: LP3ES. Dalam Sosiologi Reflektif, Volume 8, No. 1, Oktober 2013. Diakses <http://ejournal.uin-suka.ac.id/index.php/sosiologirefleksif/article/view/524/465> Pada 30 Mei 2016

⁴² Snow, David A.; Soule, Sarah A.; & Kriesi, Hauspeter (eds.). *The Blackwell*. Dalam Sukmana, Oman. *Sosiologi Reflektif*, Volume 8, No. 1, Oktober 2013 Diakses <http://ejournal.uin-suka.ac.id/index.php/sosiologirefleksif/article/view/524/465> Pada 30 Mei 2016

1.7. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan kaidah yang berlaku agar suatu karya tulis ilmiah dapat dipertanggungjawabkan di hadapan ilmu pengetahuan. Selain itu, metode penelitian member panduan yang tegas agar suatu karya ilmiah dapat menjadi runtut, logis dan sistematis. Menurut definisi The Liang Gie, metodologi adalah cara atau langkah yang berulang kali sehingga menjadi pola untuk menggali pengetahuan tentang suatu gejala pada ujung awalnya. Ini merupakan cara atau langkah untuk mengumpulkan data-data, sehingga pada ujung akhirnya untuk meluruskan kebenaran pernyataan yang disebut mengenai gejala tersebut.⁴³

1.7.1. Metode Pengumpulan Data

Dalam penulisan ini metode pengumpulan data yang digunakan penulis adalah studi pustaka. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui buku, jurnal, yang didapat dari perpustakaan Universitas Jember, Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dan beberapa website resmi dari internet.

1.7.2. Metode Analisis Data

Metode analisis data merupakan uraian tentang cara mengkaji dan mengolah data agar data-data tersebut dapat menjelaskan maksud dan tujuan penulis. Menurut The Liang Gie, yang dimaksud dengan analisa data adalah segenap serangkaian pembuatan pikiran yang menelaah sesuatu hal secara mendalam, terutama untuk mempelajari bagian-bagian dari suatu kebulatan untuk mengetahui ciri-ciri suatu bagian, hubungan satu sama lain dan peranannya dalam keseluruhan yang bulat.⁴⁴

Dalam analisisnya, penulis menggunakan metode analisis data deskriptif kualitatif. Metode analisis data deskriptif merupakan suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. Fenomena tersebut bisa berupa

⁴³ The Liang Gie. *Ilmu Politik: Suatu Pembahasan Tentang Pengertian, Kedudukan dan Metodologi*. 1984. Yogyakarta: Gajahmada University Press. Hal 81

⁴⁴ The Liang Gie. *Imu Politik*. Yogyakarta: Yayasan Studi Ilmu dan Teknologi. 1968. Hal. 106

bentuk, aktifitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena lainnya.⁴⁵ Sedangkan penelitian kualitatif merupakan penelitian yang ditujukan agar dapat memahami fenomena sosial melalui gambaran holistik dan memperbanyak pemahaman mendalam.

1.8. Sistematika Penulisan

Secara garis besar, karya tulis ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab 1: Pendahuluan

Bab ini akan menjelaskan tentang latar belakang, permasalahan, ruang lingkup pembahasan, kerangka teori, hipotesis, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

Bab 2: Perkembangan Masyarakat Sipil di Taiwan

Bab ini akan menjelaskan tentang perkembangan masyarakat sipil di Taiwan, membahas tentang gerakan massa di Taiwan dan peranan pemerintah serta masyarakat di dalamnya.

Bab 3: Terjadinya *Sunflower Movement* di Taiwan tahun 2014

Bab ini akan menjelaskan tentang Sunflower Movement termasuk sejarah munculnya dan bentuk gerakannya .

BAB 4: Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya Gerakan masa di Taiwan yang disebut dengan *Sunflower Movement*

Bab ini akan menjelaskan dan memaparkan apa saja factor yang mempengaruhi masyarakat Taiwan membentuk gerakan masa sehingga muncul *Sunflower Movement* di Taiwan pada tahun 2014.

⁴⁵ Syaodin Nana Sukmadinata. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya: 2006. Hal. 17

BAB 5: Kesimpulan

Bab ini berisi kesimpulan, dan gambaran singkat dari hasil analisis yang telah penulis paparkan pada bab-bab sebelumnya.



BAB 2.

PERKEMBANGAN MASYARAKAT SIPIL TAIWAN

2.1. Masyarakat Sipil Sebagai Katalis Demokratisasi

Proses demokratisasi di Negara-negara dengan rezim otoriter sangat terkait erat dengan peranan masyarakat sipil di dalamnya. Antara masyarakat sipil dan perubahan politik ditandai dengan aktifitas masyarakat yang sering memulai suatu perkembangan dan perubahan dalam struktur sosial yang mengarah pada perubahan rezim. Melalui berbagai bentuk kegiatan, mereka berkontribusi dalam proses transisi demokrasi yang sedang terjadi dan terus berkelanjutan sampai pada tahap konsolidasi politik. Selanjutnya demokratisasi politik mulai menyediakan sarana untuk perkembangan masyarakat sipil sesuai dengan ketentuan hukum dan kelembagaan dengan pertumbuhan LSM, gerakan sosial masyarakat, dan penguatan aktifitas sipil.⁴⁶

Demokrasi merupakan bentuk organisasi sosial yang memerlukan pertumbuhan dan perkembangan yang konstan untuk eksistensinya pada tingkat kelembagaan maupun non-kelembagaan. Dan aktifitas masyarakat sipil disini sebagai salah satu katalisator untuk perkembangan dan pertumbuhan demokrasi yang konstan ini. Hal ini menunjukkan bahwa semakin kuat hubungan masyarakat sipil dan proses transisi demokratis maka semakin sukses pula proses demokratisasi dalam suatu Negara. Struktur yang dikembangkan masyarakat sipil merupakan kondisi untuk pemanfaatan potensi beragam untuk tujuan pemerintah yang demokratis dan keterlibatan warga Negara dalam kehidupan publik untuk terlibat langsung dalam mempengaruhi kebijakan publik.⁴⁷

Negara yang demokratis membentuk mekanisme kelembagaan perlindungan terhadap kemungkinan distorsi demokrasi terhadap kemungkinan penghapusan pemerintahan yang demokratis (sistem hukum yang efektif dan

⁴⁶ Grigorij, Meseznikov. 2013. *Democratization and Civil Society Development in Taiwan Some Lessons for Central Europe*. Intitute for Public Affairs, Bratislava. ISBN: 978-80-89345-39-7 EAN: 9788089345397. Diakses dalam http://www.ivo.sk/buxus/docs/publikacie/subory/Democratization_and_Civil_Society_Development_in_Taiwan.pdf Pada 29 September 2016

⁴⁷ *Ibid.* Hal 29

keterlibatan hukum, mekanisme *check and balance*, perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan sipil). Namun pengamanan ini tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya dukungan dan pengembangan masyarakat sipil yang memainkan salah satu peran bebas-kelembagaan atau kembali ke rezim otoritarian di Negara-negara yang sedang menjalani proses transisi demokratis. Pendekatan dan hubungan antara politik dan masyarakat sipil merupakan indikator yang penting dalam komitmen mereka untuk menjalani proses demokratisasi.

Taiwan merupakan salah satu contoh awal dari proses demokratisasi dengan pertimbangan-pertimbangan umum yang dijelaskan diatas. Taiwan dan masyarakat sipilnya merupakan aktor yang menunjukkan bahwa setelah melakukan proses demokratisasi di akhir tahun 1980-an sangat baik dalam menghadapi tantangan politik kedepannya. Keberagaman masyarakat sipil di Taiwan yang tersebar diberbagai daerah turut serta berkontribusi dalam percepatan transisi demokratik. Masyarakat sipil di Taiwan sangat kokoh dalam mempertahankan nilai-nilai dan prinsip-prinsip demokrasi serta mengejar kendali demokratis terhadap interaksi masyarakat sipil dengan pemerintah. Selama pemerintahan otoriter dari tahun 1950 menuju 1970 tidak ada kondisi yang menguntungkan bagi organisasi masyarakat sipil di Taiwan. Selama periode ini, Taiwan hampir tidak mendapatkan keuntungan dari organisasi masyarakat sipil yang ada. Terdapat 25 organisasi sipil yang diizinkan oleh rezim pemerintahan untuk beroperasi. Organisasi – organisasi tersebut merupakan unsur penyusun korporatis untuk model suatu negara, diperkenalkan dan didukung oleh pemerintah berkuasa saat itu yaitu KMT.

Terdapat beberapa jenis LSM dan asosiasi-asosiasi yang berkembang di Taiwan yang termasuk dalam asosiasi yang bergerak dalam bidang ekonomi dan perdagangan seperti asosiasi petani, perikanan, tenaga kerja, industri dan asosiasi profesional (pengacara, dokter, dan akuntan) yang merupakan jenis utama asosiasi yang ada di dalam masyarakat Taiwan. Asosiasi – asosiasi tersebut di pimpin oleh pihak pemerintah dan munculnya asosiasi yang di pimpin oleh independen pada masa itu sulit berkembang. Terutama ketika asosiasi tersebut

melibatkan isu-isu politik yang sensitif. Pemerintah terkesan member ruang gerak yang sempit untuk masyarakat Taiwan meskipun sudah terhimpun dalam asosiasi.

Keadaan di Taiwan seperti ini mengingatkan kita pada keadaan Negara-negara lain dengan rezim non-demokratik, termasuk orang-orang dengan orientasi ideologi yang berbeda (seperti komunis di Negara bagian Eropa Tengah dan Timur). Keadaan mulai berubah pada tahun 1980-an dimana proses demokratisasi yang didukung oleh masyarakat sipil dimulai pada tahun 1980-an, selain mengikuti tren liberalisasi dalam hukum KMT yang tidak hanya hasil dari kegiatan-kegiatan kelompok reformis dan orang-orang KMT, tetapi juga sebagian besar sebagai akibat dari tekanan yang diberikan oleh kekuatan-kekuatan oposisi terhadap yang pemerintah yang berkuasa.

Masyarakat Taiwan terus bergerak untuk menarik dukungan atas tuntutan mereka kepada pemerintah tentang rezim politik yang berlangsung pada masa itu (keterlibatan militer dalam urusan administrasi negara, persyaratan pembubaran Majelis Nasional dan kritik-kritik terhadap praktik-praktik non demokratik). Masyarakat tidak hanya menarik dukungan dari golongan elit saja namun juga kepada mahasiswa dan seluruh lapisan masyarakat Taiwan. Sejak awal tahun 1980-an munculnya kegiatan sipil dapat disebut sebagai 'gerakan sosial' mewakili bentuk aktifis kolektif yang berbasis masyarakat sipil.

Gerakan-gerakan ini bertujuan untuk untuk memenuhi tuntutan-tuntutan mereka dalam acara-acara publik yang terbuka. Sebagai contoh, pada tahun 1987 terjadi demonstrasi besar-besaran terdapat 1800 demonstran yang setidaknya ada 25 gerakan kolektif (demonstrasi dan petisi) yang terjadi di Taipei di depan gedung parlemen. Setahun berikutnya, di tahun 1988 jumlah demonstrans yang tercatat mengalami peningkatan ke angka 2,894 massa. Pada tahun 1980 terdapat gerakan kolektif dengan tujuan yang berbeda dan cara penyampaian yang berbeda pula. Mereka cenderung memberikan profil mereka sendiri dengan tuntutan yang lebih spesifik sesuai dengan kebutuhan kelompok mereka dengan inisiatif-inisiatif untuk memecahkan masalah di daerah mereka. Tidak dapat dipungkiri bahwa

gerakan sosial dan masyarakat sipil merupakan komponen penting dalam berdirinya Taiwan.⁴⁸

2.2 Elemen Struktural Masyarakat Sipil di Taiwan

Perkembangan Taiwan dimulai tahun 1980an dengan 3 gelombang gerakan-gerakan sosial yang termasuk dalam 20 inisiatif. Gelombang pertama sebagian besar berkontribusi dalam rezim liberalisasi dan penghapusan hukum beladiri yang kemudian mempengaruhi proses transisi demokratisasi. Hsiao berpendapat bahwa actor-aktor masyarakat sipil memiliki dorongan kuat untuk bergerak ke arah perubahan mendasar dalam ranah politik, ketika “KMT mengakui bahwa tuntutan dari masyarakat sipil semakin meningkat dari mobilisasi yang mereka lakukan. Meskipun pihak oposisi telah lama ada, bahkan dibawah pemerintah otoriter, namun hal itu juga tidak mampu menjelaskan percepatan tekanan intensif dari gerakan-gerakan sosial masyarakat sipil yang terorganisir”.⁴⁹

Berikut beberapa tipologi gerakan-gerakan sosial yang ada di Taiwan sejak tahun 1980-an: Gelombang pertama gerakan-gerakan sosial yang terorganisir berlangsung antara tahun 1980 dan 1986 sebelum hukum beladiri diangkat pada bulan Juli tahun 1987, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hal tersebut terjadi sebelum politik liberalisasi. Ada 7 gerakan yang termasuk didalamnya⁵⁰, yakni:

- Gerakan Konsumen (1980)
- Gerakan Protes Anti Polusi (1980)
- Gerakan Konservasi Alam (1982)
- Gerakan Perempuan (1982)
- Gerakan Aborigin (1983)

⁴⁸ Hsiao, Hsin-Huang Michael 2011, p. 238. *Democratization and Bureaucratic Restructuring in Taiwan* (Summer 2000); Hal 34. Diakses di <http://search.proquest.com/docview/220627740/3FC7EB5E2CC24399PQ/12?accountid=38628> pada 15 Agustus 2016

⁴⁹ *Ibid*

⁵⁰ *Ibid* hal 34-35

- Gerakan Mahasiswa (1986)
- Gerakan Protes Perjanjian Gereja Baru (1986)

Gelombang kedua gerakan sosial masyarakat sipil yang terorganisir dimulai pada tahun 1987. Pada tahun ini partai yang berkuasa Partai Nasional China (Koumintang, KMT) akhirnya mengambil langkah –langkah menuju liberalisasi dan demmokratisasi dengan mengangkat hukum beladiri, pembentukan partai politik baru dan mengizinkan pembentukan kebijakan pers yang baru. Perubahan ini beriteraksi dengan munculnya 7 gerakan-gerakan sosial yang lain, yakni:

- Gerakan Buruh (1987)
- Gerakan Petani (1987)
- Gerakan Guru (1987)
- Gerakan Protes Kelompok Kesejahteraan Tertinggal dan Cacat (1987)
- Gerakan Hak Asasi Tahanan Politik (1987-1989)
- Gerakan Mainlanders Home Visiting (1987-1989)

Gelombang ketiga dan merupakan gelombang terkahir dalam dekade yang muncul setelah pengangkatan hukum beladiri, ketika pemerintah merestrukturisasi lembaga-lembaga pemerintahan Taiwan lebih lanjut. Selama periode pasca otoriter transformasi politik, total 6 gerakan-gerakan sosial baru yang muncul, yakni:

- Gerakan Taiwan's Home-Returning (1988-1993)
- Gerakan Hakka (Masyarakat Adat) (1988)
- Gerakan Kekuatan Anti-Nuklir (1988)
- Gerakan The non-homeowners “shell-less snail”(1989)
- Gerakan Reformasi Peradilan (1990)
- Gerakan Otonomi Wartawan (1993)

Tipologi gerakan sosial tersebut menunjukkan bahwa terdapat keberagaman sosio-demografis, etnis, jenis kelamin, professional, dan orientasi

dalam kegiatan masyarakat sipil di Taiwan. Hsiao berpendapat bahwa “Mayoritas organisasi gerakan sosial masyarakat sipil yang ada di Taiwan merupakan hasil dari periode transisi demokratis yang terjadi sehingga masyarakat sipil juga ikut melakukan gerakan-gerakan sesuai dengan tuntutan masing-masing” kemudian inisiatif gerakan dikembangkan lebih lanjut dengan mengambil karakter dari gerakan sosial (Gerakan anggota LGBT⁵¹, Penghuni liar perkotaan, lisensi pekerja seksual, gerakan reformis untuk perawatan kesehatan). Tuntutan yang disampaikan oleh kelompok masyarakat tersebut kemudian menjadi perdebatan dalam kalangan pengambil keputusan dan ada beberapa tuntutan yang kemudian menjadi kebijakan publik ada pula yang masih harus di analisis lebih lanjut.

Sebagai upaya untuk mengubah peranan masyarakat dalam perpolitikan Taiwan, terbentuknya gerakan sosial dipengaruhi oleh lingkungan politik yang ada dalam negeri tersebut. Istilah *Political Opportunity Structure* digunakan untuk memahami pengaruh eksternal pergerseran yang membatasi atau memfasilitasi aksi kolektif. Demokratisasi merupakan kekuatan yang paling penting untuk mengubah Taiwan. selama tiga decade terakhir, selama transisi politik Taiwan gerakan sosial Taiwan mengalami beberapa tahapan perubahan.

Menurut Ho Ming-sho⁵², selama periode liberalisasi demokratisasi dan konsolidasi demokrasi, gerakan sosial di Taiwan telah menjalani lima proses yaitu:

1. *Fermentation* (1980-1986)

Memasuki tahun 1980, ketidak puasan masyarakat Taiwan terhadap pemerintah ditandai dengan adanya kebijakan pemerintah yang dinilai merugikan masyarakat. Kebijakan industrialisasi pemerintah Taiwan mengakibatkan beberapa dampak yaitu degradasi lingkungan, kemiskinan didaerah pedesaan dan eksploitasi kelas. Hal ini sudah sangat mengkhawatirkan masyarakat. Terdapat kesenjangan sosial yang tinggi yang terjadi pasca industrialisasi yang diterapkan

⁵¹ LGBT Singkatan dari kelompok Lesbian, Gay, Bisex dan Transgender

⁵² *Ibid* Hal 36

di Taiwan. Ketidakpuasan ini mendorong munculnya gerakan sosial dalam periode ini. Suasana politik pasca insiden Kaohsiung⁵³ membuat pemerintah mengambil tindakan pelarangan didirikannya organisasi yang tidak legal di Taiwan.⁵⁴

Adanya modernisasi ekonomi yang terjadi di Taiwan membuat masyarakat Taiwan khususnya golongan kelas menengah seperti dokter, pengacara, dan wartawan memainkan peranan penting dalam membangun asosiasi dan gerakan sosial. Hal ini bertujuan untuk mengurangi peranan pemerintah dalam mengontrol organisasi masyarakat agar dapat berdiri lebih independen. Posisi kelas dalam masyarakat mempengaruhi bagaimana aktifitas mereka dalam mengejar agenda dan kepentingan mereka dalam asosiasi tersebut. Hal ini lebih berdampak lebih signifikan dalam keberlangsungan karena lebih menonjolkan ketidakberpihakan dan membangun citra profesionalisme. Dengan berhati-hati mereka mengkritik pemerintah terkait dengan kebijakan-kebijakan yang diterapkan. Seperti contoh, dengan status asosiasi semi resmi mereka mengkritik beberapa proyek ekologis yang berdampak buruk bagi lingkungan. Para aktifis yang tergabung dalam asosiasi yang menentang proyek ekologis ini berhasil mempengaruhi masyarakat sipil dan kemudian berhasil membatalkan rencana pemerintah.

Ada pula kelompok aktifis lain di kelas menengah yang mengadopsi pendekatan langsung dan tidak menghindari isu-isu sensitif. Tokoh intelektual, wartawan, dan pengacara mendirikan tiga organisasi pada tahun 1984; Asosiasi Taiwan untuk hukum bantuan kepada pekerja, Asosiasi Taiwan untuk Hak Asasi Manusia dan Asosiasi Taiwan untuk mempromosikan Hak Aborigin. Sesuai dengan sikap mereka yang lebih konfrontatif, para aktifis ini tidak berusaha untuk mendaftarkan organisasi mereka secara resmi melainkan mereka lebih terkonsentrasi pada penyediaan bantuan kepada penduduk yang ditargetkan. Di

⁵³ Kota terbesar kedua di Taiwan

⁵⁴ Ho, Ming-sho. *Understanding the Trajectory of Social Movements in Taiwan (1980-2010)*, in: *Journal of Current Chinese Affairs*, 39, 3, 3-22. ISSN: 1868-4874 (online), ISSN: 1868-1026. 2010. Dalam <http://journals.sub.uni-hamburg.de/giga/files/journals/3/articles/301/public/301-305-1-PB.pdf> Diakses pada 9 Sept 2016

tahun 1985-1986 misalnya, pengacara yang tergabung dalam Asosiasi Bantuan Hukum Taiwan untuk Pekerja yang terlibat dalam kasus manajemen diri pekerja.

Masyarakat biasa yang menjadi korban polusi industri atau dituntut karena keyakinan agama mereka juga memprakarsai munculnya gerakan sosial dalam periode ini. Menjelang akhir periode ini, ada tanda-tanda bahwa organisasi masyarakat mulai terorganisir menjadi keuntungan tersendiri dalam perkembangan organisasi masyarakat. Pada tahun 1987 terdapat 87 protes yang diprakarsai oleh aktifis masyarakat yang menentang adanya proyek investasi Perusahaan DuPont US. Gerakan anti DuPont segera memperoleh perhatian nasional dan gerakan Lingkungan Taiwan. Organisasi formal konservasionis dibentuk, dan kelas menengah menjadi terlibat untuk pertama kalinya. Empat bulan sebelum pemerintah mencabut keadaan darurat militer akibat adanya gerakan sosial masyarakat, DuPont memutuskan untuk menunda proyek dan hal ini merupakan kemenangan manis bagi masyarakat lokal dan aktifis gerakan sosial.

2. *Popular Upsurge* (1987-1992)

Pencabutan hukum militer di tahun 1987 pada dasarnya merupakan perhitungan politik untuk menghindari skenario terburuk meningkatnya tantangan dari partai oposisi dan gerakan sosial yang telah datang sekitar pertengahan 1980-an. Semakin lama pemerintah menunda-nunda yang lebih tidak terduga maka konsekuensinya semakin tidak terkendali. Meskipun demikian, liberalisasi politik lebih menstimulasikan pertumbuhan dari gerakan sosial dengan menghapus ketakutan psikologis yang tidak terlihat. Hal ini dibuktikan dengan jumlah yang luar biasa besar dari gerakan sosial yang didirikan tahun 1987 seperti Asosiasi Perdamaian pada Februari, Asosiasi untuk mereformasi Universitas Hukum, Asosiasi HAM guru di Taiwan, Majalah Hakka, Asosiasi Hak Petani, Uni Perlindungan Lingkungan Taiwan, Pendidikan Masyarakat Humanistik dll.

Mereka semua akan memainkan peran utama dalam kategori yang berbeda dari gerakan sosial di Taiwan.⁵⁵

Selain itu, hak berkumpul dan membentuk organisasi bagi masyarakat Taiwan dikembalikan pada tahun 1988 dan mendapat kebebasan yang lebih besar untuk membentuk organisasi sipil yang telah dilegalkan pada tahun 1989. Sementara itu, DPP⁵⁶ juga menemukan keterkaitan antara protes terhadap hubungan sosial-politik., sehingga banyak politisi mulai mengambil peran yang lebih aktif. Yang terakhir, untuk yang mensponsori protes sosial adalah mereka yang mengejar posisi dan memperkuat hegemoni mereka dan mempermudah mereka dalam pemilihan umum. Mereka menggunakan kapasitas mereka untuk berbicara atas nama kepentingan gerakan atau sebagai inisiator protes di distrik pemilihan mereka. Konsekuensinya, gerakan sosial menjadi lebih luas dan radikal menjelang akhir tahun 1980-an. Hal ini disampaikan oleh O' Donnell dan Schmitter sebagai "Kebangkitan Populer"⁵⁷

Sebelum pencabutan hukum darurat militer di Taiwan, kontroversi mengenai energi nuklir merupakan perselisihan utama. Pada bulan Maret 1988 aktivis anti nuklir menyebar ke penduduk setempat yang bertempat tinggal di dekat pusat perkembangan nuklir untuk melakukan protes yang bertahan hingga satu dekade. Pada awal 1988 pemerintah Taiwan menyaksikan aksi pemogokan kerja dalam jumlah yang besar sebagai upaya untuk menuntut kompensasi pekerja sebagai bonus tahunan mereka. Sebelumnya pihak perusahaan sudah menyangka bahwa insentif yang diberikan kepada pekerja akan cukup membuat mereka puas dan tunduk terhadap segala aturan yang ditetapkan dan tidak menentang kewenangan yang ada.

Selain itu, meningkatnya rasa ketidaknyamanan masyarakat membuat gerakan sosial semakin banyak bermunculan. Sebagai respon masyarakat dalam memprotes pemerintah kaum konservatif KMT yang berusaha menggagalkan

⁵⁵ *Ibid.* Hal 8 Diakses 12 Sept 2016

⁵⁶ DPP (Democratic People Party) merupakan partai oposisi yang ada di taiwan.

⁵⁷ *Ibid.* Hal 8 Diakses 12 Sept 2016

inisiatif liberalisasi yang diprakarsai oleh Chiang Ching-Kuo (Jiang Jinguo) dan diikuti oleh Lee Theng-Hui⁵⁸, mahasiswa melakukan aksi protes pada bulan Maret 1990 untuk menuntut reformasi di Taiwan. Sebagai bagian dari gerakan *Wild Lilly Movement*, mahasiswa menduduki monument Chiang Kai-shek sebagai bentuk gerakan tersebut dan meminta pemerintah melakukan dialog langsung dengan masyarakat. Intervensi masyarakat yang tepat waktu dalam melakukan gerakan membuat aksi ini berlangsung damai dan diakhiri dengan Janji Lee Theng-Hui untuk segera melakukan reformasi di Taiwan.

Meningkatnya kekerasan dalam gerakan sosial selama periode ini membuat pemerintah mengambil kebijakan untuk mendisiplinkan para aktifis gerakan sosial. Usaha yang sistematis untuk mendisiplinkan gerakan aktifis muncul selama kepemimpinan Hau Po-Tsun's (1990-1993). Asumsi Hau sebagai perdana menteri pada Mei 1990 secara mengejutkan memprovokasi putaran lain dari gerakan sosial. Hau mempublikasikan bahwa aktifis gerakan sosial merupakan salah satu pengganggu stabilitas dalam negeri. Dalam periode ini, polisi bertindak paksa terhadap beberapa blokade anti polusi. Pemimpin dari asosiasi petani, gerakan buruh dan lingkungan ikut di blokade dan dipenjara. Pemerintah pada akhirnya berusaha untuk merevisi undang-undang buruh yang di sinyalir terlalu "ramah" kepada pekerja dan memaksa untuk bekerja secara cepat beberapa proyek ekologis kontroversial.

Upaya Hau untuk "menegaskan kembali otoritas publik" telah bertemu dengan partisan dan mengubah kalangan aktifis gerakan sosial. Dalam pemilu nasional tahun 1990 dan 1992 banyak aktifis yang memperoleh kesempatan untuk masuk keanggotaan DPP⁵⁹ dan bergabung dengan partai untuk mengkampanyekan isu-isu gerakan sosial ke kotak suara. Pada akhirnya, kekuatan gerakan sosial dan oposisi terbukti mampu melawan reaksi otoriter. Dengan kemenangan DPP 1992 dalam pemilu legislatif, antagonisme antara kelompok dan reformis dengan KMT

⁵⁸ Politikus Republik Tiongkok (ROC). Ia tampil sebagai Presiden Republik of China dan ketua Koumintang (KMT) periode 1988 – 2000.

⁵⁹ The Democratic Progressive Party (DPP) is a [progressive](#) and [centre-left liberal political party](#) in [Taiwan](#), and the dominant party in the [Pan-Green Coalition](#). It is currently the majority ruling party, controlling both the presidency and the unicameral [Legislative Yuan](#).

dapat di atasi. Pengunduran diri Hau tidak hanya menandakan penurunan kelompok tetapi juga berhasil menjinakkan ketegangan antara Negara dan gerakan sosial.

3. *Institutionalization* (1993-1999)

Institusionalisasi sering dianggap sebagai persamaan radikalisasi dan birokratisasi, yang bersama-sama secara efektif mengakhiri gerakan aktifisme. Namun kelembagaan disini merupakan proses yang mana sesuatu tersebut menjadi permanen, rutin dan fitur yang sah dalam masyarakat yang baru mengalami proses demokratisasi. Gerakan sosial sejauh ini merupakan lembaga yang semakin ditoleransi oleh pejabat, diterima oleh masyarakat dan sebagai moduler masyarakat dalam mengklaim berbagai kepentingan mereka.

Terdapat 3 aspek setelah perubahan politik tahun 1992 yang mempengaruhi perkembangan lembaga-lembaga gerakan sosial. Pertama, era kepolisian yang preventif dan protes masyarakat yang dipolitisi oleh oknum-oknum pemerintahan sudah tidak ada lagi, sebagai perintah pemerintah pusat untuk eksekutif polisi lokal. Evaluasi data peradilan telah mengkonfirmasi tingkat yang lebih luas dalam mencapai kesepakatan dengan pengunjuk rasa. Jumlah orang yang didakwa setiap satu juta demonstran menurun dari 24.1 (1988-1992) ke 12.6 (1993-1999). Prosentase penolakan pengaplikasian hukum ini untuk para demonstrans adalah 0.32 % dan 0.00 % masing-masing untuk dua periode ini. kedua, sebelum pemilihan legislatif 1992, hanya ada beberapa persentase yang kecil untuk parlemen yang dipilih oleh masyarakat Taiwan. Parlemen dari daratan china yang dipilih tahun 1947 itu diberikan hak seumur hidup untuk duduk dikursi legiskatif Yuan dan bahkan ketika mereka meninggal, KMT lah yang menunjuk pengganti. Praktik yang tidak demokratis ini dikritik sebagai “Pengekalan Parlemen”.

Dengan pembukaan saluran pembuatan undang-undang, proses lobbying menjadi metode efektif untuk memajukan agenda sosial. Akhirnya, DPP mengamankan tempat di arena politik Taiwan dipicu perubahan hubungan dengan

gerakan sosial. DPP datang untuk memperoleh kursi parlemen yang lebih banyak, menghadapi lebih banyaknya keberagaman dengan sektor yang konservatif. Gejala dari guliran sentris ini adalah keputusan untuk menghapus Departemen Gerakan Sosial di markas DPP pertengahan tahun 1996.

Mengambil keuntungan dari suasana politik yang mendukung, gerakan sosial mampu membuat beberapa kemajuan nyata. Mengatasi pihak oposisi dari pejabat ekonomi, keberhasilan legislatif dibidang AMDAL lingkungan pada tahun 1994. Gerakan perempuan mencapai keberhasilan hukum dengan merevisi peraturan hukum pernikahan (1996) dan kekerasan dalam rumah tangga (1998). Aktifis buruh yang diperoleh ekstensi standar hukum tenaga kerja di tahun 1996, yang berarti bahwa sekitar dua juta pekerja kerah putih yang diberikana perlindungan tenaga kerja minimum.

Selain terobosan ini, beberapa gerakan-gerakan sosial yang dibuat dengan struktur administratif dengan memperoleh hak untuk partisipasi dalam beberapa pengambilan keputusan atau mendapatkan pengakuan resmi yang sah sebagai satu-satunya wakil untuk konstituen mereka. Komite Penasihat Konservasi satwa liar (1995), Komite Pendidikan Ekuitas Gender (1997) dan Komite Hak-hak Perempuan (1998) merupakan upaya dari buah periode ini. Dengan didirikannya badan konsultif baru-baru ini, gerakan aktifis mencapai status insider dan mampu untuk mengerahkan pengaruh dari dalam. Aktifis pendidikan telah dikerahkan untuk mendapatkan hak mengorganisasikan serikat buruh sejak tahun 1987. Pada tahun 1995 sebagian dari permintaan mereka disatukan dalam Asosiasi Guru dan disahkan untuk mewakili kepentingan mereka. Setelah itu, Asosiasi Guru diselenggarakan di sekolah, tingkat regional dan nasional yang berfungsi sebagai pengakuan *de facto* atas suara guru dan melanjutkan upaya untuk mengesahkan serikat guru. Serikat buruh independen juga memiliki keberhasilan di tingkat daerah untuk terbebas dari kontrol korporatis. Sebelum tahun 2000, 8 federasi lokal industri serikat diakui.

Dalam beberapa kasus, pemerintahan KMT mengadopsi tuntutan gerakan sosial menjadi kebijakan dalam upaya untuk meningkatkan citra pro-reformasi.

Fenomena ini terutama terlihat sejak kepemimpinannya sampai 1996. Karena itu, pada tahun tersebut adalah tahun dimana Lee Teng-hui bersaing dalam pemilihan presiden. Dalam pembangunan demokrasi untuk reformasi pendidikan pada April 1994, pemerintah dengan cepat merespon dengan mendirikan deliberatif komite reformasi pendidikan. Dua tahun kemudian, laporan akhir resmi memasukkan nilai-nilai kemanusiaan yang telah diperjuangkan oleh para aktifis. Kira-kira pada saat yang sama, Pemerintah Indonesia mempromosikan proyek “Pembangunan Komunitas Integrasi” yang secara langsung disponsori oleh Organisasi Gerakan Masyarakat yang telah menjamur sejak 1990-an. Sumber daya dari pemerintah pusat diaktifkan oleh gerakan masyarakat untuk memainkan peran yang lebih menonjol dalam masyarakat lokal dan tantangannya sampai sekarang adalah monopoli politisi klientistik.

Sementara gerakan-gerakan sosial ini mendapatkan pengaruh dan dukungan politik pada periode ini, beberapa aktifis mengalihkan perhatian mereka ke daerah-daerah profesional mereka. Di pertengahan tahun 1980-an pemikiran liberal profesional muncul untuk menjadi bagian dari jurnalistik yang dominan dan partisipasi mereka telah memfasilitasi munculnya gerakan-gerakan sosial di Taiwan. Sekarang, generasi baru dari mahasiswa memulai karir mereka dengan bekerja dan penyebaran komitmen reformasi ke arena yang berbeda. Asosiasi wartawan Taiwan (1995), Yayasan Reformasi Yudisial (1997) Yayasan Kesehatan Reformasi Taiwan (1999) adalah wakil dari upaya-upaya reformasi ini berupaya untuk mengejar otonomi jurnalistik, independensi peradilan, perlindungan yang lebih baik untuk masyarakat yang mencari suaka hukum dan hak-hak mereka, dan media demokrasi digambarkan sebagai “Mobilisasi yang tidak mengganggu” yang jarang disorot oleh pemerintah nasional dengan memobilisasi kerumuhan masyarakat dalam skala besar. Namun demikian hal tersebut merupakan cerminan dari efek *spillover* dari gerakan sosial yang terlembagakan yang tumbuh untuk mencakup masalah yang lebih dalam kehidupan sehari-hari.

Akhirnya, selain elemen ini, gerakan sosial mewakili orang-orang terpinggirkan adalah fenomena yang nyata pada tahun 1990-an. Dalam periode ini gay dan lesbian muncul kepermukaan dan menuntut kebebasan sipil mereka. Aktifitas mereka memuncak pada bulan September 2000. Meskipun kemudian DPP masih dianggap sebagai badan yang lebih dekat dengan gerakan sosial, namun Pemerintah dibawah Chen Shui-Bian dipicu protes terus menerus oleh pihak tinggi. Penghuni masyarakat liar perkotaan yang mengalami pengusuran kemudian melancarkan protes gerakan pada tahun 1996/97. Pada tahun 1997 keputusan mendadak untuk mencabut lisensi hukum pelacur memunculkan aktifitas gerakan antara pekerja seks yang menuntut legalisasi perdagangan mereka.

4. *Incorporation* (2000-2007)

Selama masa kampanye kepresidenan Chen Shui-Bian pada tahun 2000, banyak pro-reformasi, peneliti dan aktifis gerakan direkrut untuk merumuskan proposal kebijakan yang akan dilaksanakan setelah DPP mengambil alih kursi presiden. Meskipun tidak banyak orang-orang yang benar-benar diharapkan Chen untuk berhasil dalam sejarah tiga awal sebelumnya, kemenangan pasti membawa harapan bagi kalangan aktifis gerakan sosial yang bisa diangkat sebagai politisi dalam mewujudkan agenda kepemerintahan mereka. Ternyata beberapa organisasi gerakan sosial termasuk di dalam proses pengambilan keputusan, namun sebagian besar dari mereka tidak mampu menghasilkan perubahan struktural. Selama 8 tahun jangka pemerintahan DPP memberi memori dan kekecewaan sendiri bagi aktifis yang sangat optimis atas hal ini.

Dibawah pemerintahan DPP, aktifis veteran untuk pertama kalinya ditunjuk untuk memimpin badan-badan resmi termasuk Administrasi Perlindungan Lingkungan, Departemen Pendidikan, Dewan Masyarakat Adat dan Komisi Pemuda Nasional. Memang kurang terlihat namun cukup signifikan, dalam hal ini banyak aktifis muda memperoleh kesempatan untuk bekerja sebagai pembantu atau asisten di Administrasi Echelon.

Penggabungan prosedural gerakan sosial dimulai pada pertengahan tahun 1990-an, tetapi setelah tahun 2000 evolusi lebih memperkaya proses ini. Intitusi-intitusi baru mengambil keputusan yang dibuat oleh Pemerintah DPP seperti Dewan Urusan Hakka, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan Komite Bebas Nuklir Tanah Air memperluas cakupan partisipasi. Pengakuan resmi dari Konfederasi Serikat Pekerja Taiwan pada tahun 2000 merupakan sebuah tonggak penting dalam hal itu bahwa tahun tersebut tidak hanya menghapus hak istimewa yang dinikmati oleh Representatif Federasi Tenaga Kerja China tetapi juga membuka banyak organ administrasi ketenagakerjaan untuk serikat mandiri. Diantara saluran yang sudah ada, pemerintah DPP juga memungkinkan adanya pencalonan aktifis. Hal ini terjadi pada Komite Dampak Pengkajian Lingkungan, Komite Hak-hak Perempuan dan Dewan Nasional Untuk Pembangunan Berkelanjutan.

Selain itu, ada upaya untuk melakukan penelitian terkait dengan bentuk-bentuk baru pengambilan keputusan untuk kepentingan peningkatan kualitas adanya sistem demokrasi ini. Dibawah naungan resmi, 16 warga dalam konferensi mengenai perawatan kesehatan nasional, pengganti ibu, dst berlangsung antara tahun 2001 dan 2006. Prinsip *comenagement* dengan penduduk aborigin diperkenalkan untuk pertama kalinya dalam perencanaan Taman Nasional Maqaw.

Dalam periode ini dengan meningkatkan keterlibatan aktifis gerakan yang juga membawa isu tentang keberhasilan legislatif. Perlindungan bagi pekerja yang mengalami kecelakaan kerja (2001), kesetaraan gender di dalam undang-undang ketenagakerjaan (2002), Undang-undang asuransi pekerjaan (2002) dan undang-undang untuk masa redundansi karyawan (2003) adalah prestasi dari tuntutan gerakan buruh. Pada tahun 2002 pemerhati lingkungan berhasil melewati Tindakan Dasar Lingkungan yang diabadikan dengan Klausula Tanah Air Bebas Nuklir.

Gerakan-gerakan sosial tersebut mencetak sejumlah keberhasilan dalam pembuatan Undang-undang namun hal tersebut tidak membuat mereka mampu

memanfaatkan kondisi tersebut untuk melakukan perubahan struktural. Keuntungan yang telah aktifis gerakan sosial capai melalui kerjasama mereka dengan DPP hanya merupakan simbol dipermukaan, bukan yang sebenarnya terjadi. Konsensi yang mengarah pada redistribusi besar sumberdaya dan kekuasaan. Misalnya, hanya setelah DPP memutuskan untuk menyerah pada upaya untuk menghapuskan pembangkit listrik tenaga nuklir keempat yang kontroversial pada tahun 2001 hal tersebut memungkinkan frase “Tanah Air Bebas Nuklir” yang tercantum secara hukum. Demikian pula, meskipun gerakan buruh dijamin bagian dari hukum tersebut, tidak dapat menghalangi pemerintah DPP melanjutkan kebijakan privatisasi yang sangat tidak populer antara pekerja di BUMN

Hal yang paling membuat para aktifis sedikit tertekan adalah fakta bahwa partisipasi mereka dalam pemerintahan DPP yang masih tidak berhenti kearah konservatisme sosial. Menghadapi penurunan perekonomian yang sedikit signifikan, Chen menyatakan bahwa pemerintah membutuhkan program untuk menyelamatkan perekonomian pada tahun 2001. Dengan kebijakan re-orientasi ini, pemerintah DPP secara efektif memenuhi janji kampanye mereka. Meskipun Chen telah berjanji untuk melakukan perluasan keajahteraan selama kampanye, kemudian ia mengklaim bahwa pertumbuhan ekonomi harus diutamakan atas redistribusi kesejahteraan. Adanya peraturan tentang lingkungan yang dikritik oleh publik sebagai dis-insentif untuk investasi bisnis dan beberapa langkah-langkah relaksasi diperkenalkan. Pengamat ekonomi memuji keputusan pemerintah DPP yang bijaksana untuk kembali merangkul kebijakan pertumbuhan dengan stabilitas yang merupakan sebuah pengkhianatan bagi aktifis gerakan. Sesuai dengan pergerseran konservatif ini, DPP tidak lagi menyoroti serangkaian reformasi pada Pemilu 2004, sebaliknya, hal ini bergantung pada identitas Taiwan untuk memobilisasi pemilih.

Sebagai akibat dari penggabungan prosedural ini, konflik antara gerakan-gerakan sosial dan pemerintah tidak lagi dipentaskan secara publik tetapi lebih internal kearah pengambilan keputusan suatu kebijakan. Politisi DPP mungkin

bermaksud untuk mengko-optasi gerakan sosial, baik untuk menetralkan partai oposisi atau memperindah citra sosial. Meskipun demikian, apa yang tampil di permukaan merupakan pertarungan yang tidak layak ditunjukkan. Aktifis yang bergerak di bidang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mengancam akan mengundurkan diri dari dalam rangka protes yang kedua kalinya dalam 2005/06.

Peristiwa yang memicu hal tersebut adalah upaya pemerintah untuk membuat prasyarat sidik jari sebagai penerimaan baru kartu identitas dan usulan lain untuk memperkenalkan periode pendinginan dilaksanakan dalam kebijakan tersebut. Para aktifis akhirnya menang dalam kedua insiden tersebut. Namun, para aktifis lingkungan yang duduk dalam Komite Penilaian Dampak Lingkungan tidak cukup berhasil dalam upaya tersebut. Aksi pemogokan mereka gagal untuk membalikkan dukungan resmi dari beberapa konstruksi proyek-proyek kontroversi.

Dalam masa jabatan Chen yang kedua, skandal keuangan yang berkaitan dengan masalah pribadi seperti asisten dan anggota keluarga muncul kepermukaan. Pada Juli 2006 sekelompok sarjana liberal dan intelektual menandatangani kampanye untuk pengunduran diri Chen. Pada bulan oktober, beberapa putaran skala besar demonstrasi oleh pendukung Pan-Blue hampir melumpuhkan pemerintah. Saat itu, pemerintah DPP telah mengepung dengan progresif dan konservatif yang menuntut pengunduran dirinya. Pada bulan oktober, beberapa putaran gerakan sosial dalam skala besar para demonstrasi massa oleh pendukung *Pan-Blue* hampir melumpuhkan pemerintahan. Saat itu, pemerintahan DPP telah dikepung dengan ketat dengan aktifitas progresif dan konservatif yang menuntut adanya pengunduran diri Chen. Diakhir tahun kedua masa pemerintahan, Chen kembali melakukan reformasi orientasi kebijakan sebagaimana dibuktikan oleh rencana yang besar untuk meningkatkan kesejahteraan (2006); keputusan untuk menghentikan sementara masa transisi pekerjaan kebun dengan cepat yang mengancam Sanitarium Lesheng (2007); kenaikan upah minumun oleh 9.1 % (2007); penolakan terhadap proyek jalan raya Suao-Hualian (2008).

Selama kampanye presiden 2008, DPP juga menekankan komitmennya untuk keadilan sosial dengan menekankan prioritas “orang miskin” dan lingkungan. Kandidat Frank Hsieh menciptakan slogan “Kebahagiaan Ekonomi” – sebuah kritik eksplisit dari kursus menyelamatkan perekonomian Taiwan sebelumnya. Namun demikian, pergeseran terlambat ini merupakan hal yang tidak signifikan untuk memenangkan dukungan dari aktifis gerakan sosial.

5. *Resurgence* (2008-2010)⁶⁰

Ketika Ma Ying-Jeou memenangkan pemilihan presiden dengan margin kemenangan lebih dari 2 juta suara pada bulan maret 2008, KMT sudah memiliki hampir $\frac{3}{4}$ dari kursi di legislative Yuan. Hegemoni konservatif menjadi tanda yang redup bagi aktifis gerakan sosial. Selain itu, setelah beberapa tahun bekerja dalam pemerintahan, banyak organisasi gerakan sosial telah kehilangan kapasitas untuk memobilisasi konstituen mereka. Demonstrasi besar-besaran oleh anggota serikat, banyak aktifis anti-nulir dan pro-reformasi dalam bidang pendidikan kelas menengah telah menjadi sejarah dari tahun 1990-an. Hal ini mengangkat pertanyaan apakah gerakan-gerakan sosial mampu menjadi permulaan perubahan kembali.⁶¹

Pada bulan November 2008 siswa-siswa di Taiwan melakukan *comeback* gerakan yang tidak terduga untuk memprotes keberutalan polisi yang terjadi ketika Pemerintah Ma menerima kunjungan diplomatik China. Dengan sadar diri setelah dijadikan teladan sejak 18 tahun lalu, gerakan siswa tersebut menyebut gerakan mereka dengan istilah “Wild-Strawberry” dan protes mereka tidak terbatas pada kebun tapi ke daerah-daerah lain seperti Xin-Zhu, Taiz Hong, Jiayi, Tainan dan Gaoxiong. Pada bulan September 2009 intensifitas komunitas *canvassing* oleh aktifis lingkungan membuahkan hasil dengan memenangkan referendum pada sebuah kasino di Penghu County. Liberalisasi Industri Kasino

⁶⁰ Ho, Ming-sho 2012. *Democratization and Bureaucratic Restructuring in Taiwan (Summer 2000)*; 48-64 Diakses di <http://search.proquest.com/docview/220627740/3FC7EB5E2CC24399PQ/12?accountid=38628> pada 15 Agustus 2016

⁶¹ *Ibid.* Hal 17

telah dipromosikan oleh politisi KMT lokal dan didukung oleh Presiden Ma. Dan kekalahan kasino menandakan fakta bahwa aktifis gerakan tidak kehilangan pengetahuan mereka dalam menghubungkan dengan masyarakat. Setelah jeda beberapa saat, gerakan petani muncul kembali dan kali ini masalah itu tentang pembebasan lahan wajib untuk mengembangkan zona industri. Pada bulan Juni 2010 seorang jurnalis amatir merekam gambar mengejutkan dari lahan sawah yang dihancurkan oleh excavator yang dikirim oleh pemerintah. Selain itu, pekerja buruh, korban topan Marokat 2009, konsumen khawatir masyarakat sekitar terkontaminasi daging sapi Amerika dan pendukung layanan televisi publik menjadi wajah-wajah baru gerakan sosial.

Penginderaan pasar politik yang berkembang, DPP kembali mendirikan Departemen Gerakan Sosial pada bulan Februari 2009. Namun, keterlibatan politisi DPP tetap minimal dan hal itu tidak selalu terbuka terhadap setiap protes. DPP menyelenggarakan beberapa protes besar-besaran pada isu-isu Republik Rakyat China (RRC) dan integrasi ekonomi dengan China. Pihak oposisi tidak menawarkan sumberdaya untuk gerakan sosial baru yang kembali muncul. Beberapa skenario yang berbeda dibandingkan dengan apa yang telah terjadi di decade sebelumnya. Dan kemudian pertanyaan yang muncul adalah apa yang menjelaskan gelombang tak terduga terjadinya gerakan sosial?

Pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan dua cara. Pertama, mengapa gerakan sosial bereaksi dengan ketahanan dan meracau setelah delapan tahun mengalami traumatis dibawah pemerintahan DPP? Walaupun Ma Ying-Jeou menekankan pertanyaan ideologis selama kampanye, pemerintah dengan cepat memasukkan beberapa pasal dalam kebijakan regresif untuk mendukung gerakan sosial. Pemerintah KMT baru menyetujui penerapan kebijakan cuti untuk menghemat biaya tenaga kerja, berusaha untuk meningkatkan perwira militer di kampus, memperketat kontrol partisan atas media publik, menggunakan sistem peradilan untuk memberatkan lawan politik, dengan dipulihkannya china yang berpusat pada kurikulum sejarah dan mengintimidasi kritik yang mempertanyakan kebijakan lingkungan. Dengan kata lain, sementara aktifis gerakan sedang

mengalami kekecewaan oleh kegagalan DPP untuk mempromosikan reformasi progresif, mereka tidak hanya mentolerir upaya reaksioner untuk mengembalikan *status quo*. Ancaman tersebut atau kelompok sosial tersebut mengira akan menderita jika tidak mengambil keputusan tersebut.⁶²

Yang kedua, bagaimana kebangkitan gerakan sosial itu muncul? Meskipun berkomitmen, aktifis memiliki niat akan diperlukannya mobilisasi masa, gerakan tidak dapat diresusutasi tanpa adanya strategi mobilisasi yang efektif. Di tahun-tahun pemerintahan DPP, banyak aktifis belajar bahwa mereka harus melihat pemerintah secara lebih sebagai pengaruh untuk mengubah dan mulai menjelajahi jalan baru. Setelah adanya pengunduran diri secara resmi pada tahun 2006 dalam penilaian dampak lingkungan, aktifis lingkungan meluncurkan gugatan administrasi pengadilan yang terus melakukan penentangan terhadap proyek *Central Science Park*. Pada bulan Januari 2010 ketekutan mereka dihargai karena Mahkamah Pengadilan Administrasi menganulir kesimpulan dampak lingkungan ini. Sebagai tambahan, aktifis lingkungan mengadopsi pendekatan baru mengenai kampanye mereka untuk menentang proyek petrokimia guoquang. Dengan menyoroti lumba-lumba putih yang terancam punah, mereka meluncurkan suatu gerakan untuk menggalang dana dan sumbangan untuk membeli muara pasang surut di tengah Taiwan. Pada Agustus 2010 lebih dari 50.000 sukarelawan telah mendaftar. Keberhasilan kampanye ini disorot secara nasional, sebagai media yang sudah biasa memberitakan kampanye dan pemimpin akademisi mengumumkan dukungan mereka terhadap kampanye lingkungan.

Tentu saat ini masih terlalu dini untuk memberikan penilaian definitif tentang pemerintahan KMT yang baru, gerakan sosial jelas telah muncul kembali ke permukaan dan mereklamasi peran adat mereka sebagai pendukung dan penyelenggara. Namun demikian banyaknya gelombang aktifis gerakan sosial akhirnya akan mencapai batas pada evolusi konteks politik yang lebih luas, dalam

⁶² Ho, Ming-sho 2012. *Democratization and Bureaucratic Restructuring in Taiwan (Summer 2000)*; 48-64 Diakses di <http://search.proquest.com/docview/220627740/3FC7EB5E2CC24399PQ/12?accountid=38628> pada 15 Agustus 2016

gerakan sosial yang tentu memainkan peran signifikan meskipun tidak terlalu dominan.

Secara historis, munculnya gerakan sosial ini sudah ada sejak 1980-an namun pergerakannya masih tidak terlalu masif dan semu. Seiring berjalannya waktu, gerakan sosial di Taiwan merupakan variable penting dalam perjalanan demokrasi di Taiwan. Keberadaan gerakan sosial yang saat ini semakin massif dan stabil berjalan beriringan dengan pemerintah Taiwan saat ini.

Masing-masing proses ini ditandai oleh beberapa tren yang berlalu. Dalam periode 1980 – 1986 merupakan periode munculnya gerakan dan pendirian lingkungan *grass-roots* mereka. Pada periode 1987-1992, setelah penghapusan hukum beladiri, mobilisasi masyarakat sipil tersebut merupakan perubahan politik yang fundamental, perbaikan hubungan demokratis dan pencegahan terhadap kembalinya rezim otoritarian. Aktifitas masyarakat sipil pada periode ini menunjukkan tingkat politisasi yang lebih tinggi. Hal ini merupakan hasil dari keseluruhan atmosfer politik pasca penghapusan hukum beladiri. Hal ini terkait dengan fakta bahwa daerah yang terlibat gerakan-gerakan ini mempunyai maksud yang istimewa untuk kebijakan pemerintah dan partai-partai politik (demokrasi, hak asasi manusia, tenaga kerja pasar, kebijakan pertanian, perlindungan lingkungan, etnis minoritas, orang-orang aborigin dll). Selama periode ini, sejumlah aktifis sipil dan anggota dari gerakan sosial bergabung dalam oposisi DPP dan dengan demikian menjadi politisi aktif di Taiwan.⁶³

Selama 1993 – 1999, dalam periode setelah pemilihan parlemen pertama (1992), kecenderungan kearah pembentukan organisasi struktur gerakan sosial menjadi lazim. Diaktifkannya LSM bertujuan untuk memasukkan unsur politik untuk mengadvokasi dan lobi-lobi kegiatan. Organisasi sipil ini muncul untuk mengatasi masalah-masalah reformasi diberbagai daerah. Di tahun 2000-2007, masa pemerintahan dari sebelumnya oposisi DPP, wakil-wakil dari beberapa asosiasi yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Mereka menjadi anggota administrasi yang telah dikritik keras oleh sejumlah perwakilan LSM.

⁶³ *Ibid*

Akhirnya, pada tahun 2008-2010 setelah KMT berkuasa kembali, LSM mencoba untuk mengembalikan potensi oposisi, kritik terhadap kebijakan pemerintah dan berusaha untuk memobilisasi para pendukung mereka untuk membuat tuntutan dalam berbagai bidang.

Analisis kinerja LSM dan inisiatif masyarakat selama tiga dekade terakhir menunjukkan bahwa organisasi masyarakat sipil telah memainkan peran penting dalam proses demokratisasi dan dalam berbagai tahap ini peranan tersebut didasarkan pada tantangan yang paling mendesak. Dalam kasus Taiwan masyarakat tidak hanya sebagai penjamin untuk mempertahankan demokrasi melainkan juga sebagai fasilitator demokrasi di fase awal proses transisi.

2.3 Sosio – Ekonomi dan Sosial Budaya sebagai Latar Belakang Munculnya Gerakan Masyarakat Sipil di Taiwan

Perkembangan masyarakat sipil di Taiwan dimulai sejak liberalisasi yang diterapkan oleh KMT yang memerintah dan dipercepat setelah proses demokratisasi dimulai dan yang melatar-belakangi adalah sosio-ekonomi dan sosio-kultural yang terjadi di Taiwan. Sebagai Negara dikawasan Asia Tenggara, jenis masyarakat Taiwan ditandai dengan penyebaran kelompok yang berpikir hirarkis dalam hubungan kelompok-kelompok sosial yang berbeda. Bagian yang signifikan dari nilai orientasi populasi ditandai oleh warisan tradisi konfusius sebagai otoritas eksternal. Secara umum, faktor tradisional tersebut dianggap sebagai kemungkinan adanya kompilasi untuk proses transisi menuju demokrasi liberal, salah satu pilarnya adalah penekanan pada nilai-nilai individualistis, kebebasan individu dan perlindungan terhadap dominasi entitas kolektif individu yang cenderung lebih rendah dan membatasi kebebasan individu dan menghalangi tindakan independen tindakan orang-orang dalam kehidupan publik. Kesadaran kelompok dan Budaya Asia Timur jelas merugikan pembangunan demokrasi kawasan.⁶⁴

⁶⁴ Grigorij, Mezesnikov. 2013. *Democratization and Civil Society Development in Taiwan Some Lessons for Central Europe*. Institute for Public Affairs, Bratislava. Dalam

Dalam masyarakat dengan otoritas organisasi kekuasaan politik kolektif (kelompok) biasanya berpikir untuk menguatkan organisasi semacam itu untuk membenarkan tatanan sosial yang sudah ada dan untuk mempertahankan kebijakan tertentu. Rezim ini berdasarkan ideologi kolektif terutama menarik bagi keseluruhan nilai-nilai secara keseluruhan, merangkul kepentingan individu yang memajukan dan memperthankan rezim. Pemikiran kolektif biasanya bertindak sebagai faktor “*non-motion*”, imobilitas dan pelestarian rezim “kuno”. Di Taiwan, bagaimanapun juga, disposisi sosio-kultural tidak menjadi kerusakan fatal dari demokratisasi dan tidak menghentikan kegiatan gerakan-gerakan sosial dan LSM yang dalam banyak kasus bergantung pada tindakan individu dan digunakan sebagai argumen individualistis untuk membenarkan mereka.⁶⁵

Ada faktor-faktor *counter-balance* sebagai efek dari pemikiran kelompok kolektif dan nilai-nilai kolektifitas tradisional yang berakar dari kesadaran masyarakat. Dalam level politik terdapat faktor intitusional sebagai pemilihan demokratis dan kelompok sipil, meningkatkan partisipasi warga yang aktif. Pada tingkat sosio-ekonomi mereka termasuk dalam perubahan struktur sosial dari populasi yaitu pembentukan dan penguatan dari kelas menengah sebagai hasil dari perekonomian yang berkembang. *The Economic Miracle* Taiwan yang mengubah Negara tersebut menjadi salah satu macan ekonomi dan memimpin dalam pengembangan dan pembuatan produksi Hi-Tech adalah topik yang layak diperhatikan secara khusus. Umumnya, faktor-faktor perekonomian Taiwan yang signifikan dibedakan dalam tempo sebelum demokratisasi dari Negara-negara bekas jajahan uni soviet, dimana di tahun 1980-an stagnansi dan keterbelakangan ekonomi mulai di amati. Sementara di Taiwan, pembangunan ekonomi menciptakan lingkungan sosial yang lebih baik untuk rezim liberalisasi politik secara bertahap dan demokratisasi masyarakat berikutnya. Di Negara-negara sentral eropa terdapat masalah dalam perekonomian Negara sehingga

http://www.ivo.sk/buxus/docs/publikacie/subory/Democratization_and_Civil_Society_Development_in_Taiwan.pdf (3 Mei 2016)

⁶⁵ *Ibid.* Hal 35

menyebabkan kejatuhan dari rezim komunis. Oleh karena itu sangat diperlukan sekali reformasi besar-besaran oleh Negara komunis seperti pemasaran, liberalisasi, dan privatisasi bersamaan dengan reformasi dibidang politik dan dampak dari reformasi yang radikal yang dapat diprediksi. Dengan demikian gejala ekonomi yang terjadi memaksa politikus Partai Demokrat untuk mengambil tindakan cepat yang disebut *Shock-Therapy*.⁶⁶

Di beberapa Negara Eropa tengah, generasi pertama pro-reformasi Partai Demokrat pada tahun 1990-an mengalami kekalahan politik karena dampak sosial dari tahap pertama reformasi ekonomi yang dijalankan oleh pemerintah dan salah satu dampak yang cukup besar terjadi pada sebagian besar penduduk Eropa. Salah satu dampaknya terkait dengan peningkatan perekonomian masyarakat Taiwan adalah meningkatnya standar hidup masyarakat Taiwan secara umum yang pada akhirnya menciptakan kondisi yang menguntungkan untuk perubahan di bidang politik. Masyarakat kelas menengah mengalami perkembangan yang lebih tinggi terutama yang tinggal di wilayah perkotaan dimana banyak masyarakat yang memiliki pekerjaan profesional dengan pekerjaan perwakilan intelektual yang tinggi, biasanya cenderung akan mendukung dan mempromosikan nilai-nilai demokrasi dan kebebasan individu dan masyarakat lebih siap untuk menerima pendapat politik dan pluralisme. Di lingkungan seperti ini kemungkinan besar masyarakat akan bangkit untuk terus melakukan inisiatif untuk kebutuhan sosial yang ada disekitar. Pemerintah Taiwan optimis bahwa pengalaman dan sejarah proses transisi demokrasi akan memudahkan pemerintah membangun hubungan dengan masyarakat kelas menengah untuk terus melakukan pembangunan demokrasi.

Tidak dapat dipungkiri bahwa beberapa gerakan sosial masyarakat terbentuk dari masyarakat kelas menengah selama proses transisi politik liberalisasi ke proses politik demokratisasi di Taiwan. Selain itu hal khusus yaitu kinerja sektor ketiga di Taiwan merupakan hal yang cukup mempengaruhi dalam hubungan masyarakat secara individu dan akademisi (ilmuan dan universitas) dari

⁶⁶ *Ibid.* Hal 36

lingkungan organisasi aktifis non-pemerintahan dan beberapa inisiatif sipil. Beberapa dari mereka menjadi pihak yang berpengaruh di NGO sebagai pemimpin, wakil-wakil pemerintah, anggota dewan direksi dan pengawas serta tim ahli. Penghormatan yang diberikan oleh akademisi kepada masyarakat Taiwan membuat tingkat kredibilitas organisasi meningkat dimana orang-orang tersebut terlibat.

Peran penting yang dapat dikaitkan dengan perubahan dalam bidang pendidikan adalah meningkatnya jumlah universitas dan perguruan tinggi di Taiwan. Hal tersebut dapat diartikan bahwa semakin banyak masyarakat sipil yang masuk ke perguruan tinggi sehingga kualitas sumberdaya manusianya mengalami peningkatan dan dengan demikian tercipta kondisi masyarakat sipil yang madani. Proses menyampaikan informasi kepada masyarakat akan semakin mudah di jangkau dengan terus meningkatnya teknologi informasi sebagai sarana untuk menyebarluaskan informasi baru secara berkelanjutan kepada masyarakat. Keberagaman dan pluralistik media informasi yang ada di Taiwan membawa kontribusi sebagai penguatan atas prinsip keberagaman masyarakat Taiwan. Hal tersebut berdampak pada terbentuknya opini masyarakat terhadap isu-isu di kehidupan sosial dan sebagai media masyarakat untuk dapat memilih beberapa pola perilaku politik. Dimensi budaya, nilai-nilai otoritas politik konfusius secara bertahap dapat digantikan oleh otonomi liberalian, ketegasan dan pemenuhan diri.

Beberapa faktor lain, sebagian besar faktor sosial-politik dan sosial-budaya yang diringkas oleh John Hsieh, yang menulis tentang perubahan besar budaya masyarakat Taiwan yang dialami beberapa dekade terakhir. Taiwan telah mejadi bagian dari pasar global dan hal tersebut tentu akan membuat negara tersebut lebih terbuka dengan negara lain. Informasi dan pengetahuan tentang perkembangan demokrasi yang terjadi di berbagai negara (Jepang, Amerika Serikat, dan Negara-negara barat lainnya) telah menyebar ke lapisan masyarakat di Taiwan. Warisan ideologis ROC yang dicetus oleh Sun Yat-Sen yang mengatakan bahwa demokrasi merupakan bagian dari konstituen telah menjadi subjek studi di sekolah yang membangkitkan kesadaran tentang kesesuaian nilai-

nilai demokrasi di tatanan demokratis. Pengalaman pada pemilihan yang majemuk dan kompetitif selama pemerintahan otoriter memiliki dampak yang serupa. *Quasi-pluralistic* dalam tatanan sosial merupakan macam-macam dari asosiasi dan perusahaan bisnis yang merupakan konsekuensi dari perkembangan sosial-ekonomi untuk kegiatan aktifis independen dan oposisi. Masalah etnis dan identitas nasional juga memainkan peran penting yang signifikan sejak masalah penduduk ini muncul sebagai salah satu faktor mobilisasi dan promosi perubahan demokratis.⁶⁷

2.4 Peraturan Hukum “Sektor Ketiga”

Perubahan politik di akhir tahun 1980-an dan proses transisi demokrasi tidak hanya mengarah pada munculnya berbagai aktifitas LSM tetapi juga penghapusan sejumlah hambatan dalam pengembangan peraturan daerah. Perubahan legislatif yang menyebabkan modifikasi dari organisasi yang berbasis NGO dan struktur otentik. Seperti yang dilaporkan, The-Chang Lin “Pada 1992, Pemerintahan KMT merevisi undang-undang tentang aturan organisasi masyarakat sipil dan menciptakan seperangkat aturan dibawah hukum organisasi sosial yang mengubah pemimpin CSO dan melakukan kampanye sosial menjadi NPO dan NGO. Hal ini merupakan usaha untuk mengintegrasikan menjadi tipe hubungan masyarakat dan negara menjadi lebih normal. Dalam hal hubungan Negara dan masyarakat sipil, kemunculan masyarakat sipil muncul sejak berakhirnya masa darurat militer di tahun 1987, tidak hanya memaksa pemerintahan untuk menyerahkan kontrol atas masyarakat tetapi juga menyebabkan pemerintah harus mencari banyak bantuan untuk menangani masalah sosial seperti perlindungan lingkungan, bencana alam dan kesejahteraan sosial.”⁶⁸

⁶⁷ *Ibid.* Hal 39

⁶⁸ Grigorij, Mezesnikov. 2013. *Democratization and Civil Society Development in Taiwan Some Lessons for Central Europe*. Institute for Public Affairs, Bratislava. Dalam http://www.ivo.sk/buxus/docs/publikacie/subory/Democratization_and_Civil_Society_Development_in_Taiwan.pdf (3 Mei 2016)

Menurut undang-undang pemerintah Taiwan, ada 3 kategori organisasi-organisasi masyarakat sipil yaitu: Yayasan (organisasi keuangan dengan status hukum legal), perusahaan (organisasi sosial status hukum legal) dan organisasi sosial lainnya (kelompok sosial). Yayasan yang diatur oleh perdata, perusahaan diatur oleh hukum perdata dan hukum asosiasi sipil (CAA) dan organisasi sosial (seperti halnya partai politik) diatur oleh undang-undang Asosiasi Sipil. Dan ada juga organisasi-organisasi yang tidak terdaftar.⁶⁹

Yayasan merupakan asosiasi non-keanggotaan yang didirikan dengan hukum legal. Menurut perdata, dana atau properti masyarakat dapat berkumpul untuk membuat organisasi atau yayasan yang mengikuti tujuan yang didirikan oleh para pendiri. Pendirian yayasan ini didasarkan pada moneter atau property pribadi. Perusahaan didirikan dengan tujuan untuk mencapai tujuan bersama. Hukum perdata terbagi menjadi dua kelompok yang berbeda yaitu nirlaba dan bukan untuk nirlaba (juga disebut sebagai amal perusahaan atau keuntungan umum perusahaan). Yang pertama adalah badan usaha, sementara yang kedua focus pada kepentingan umum, termasuk untuk asosiasi petani, pekerja, konsumen, dll. Organisasi sosial adalah kelompok-kelompok yang terdaftar dibawah CAA yang memilih tidak mengajukan status hukum perdata dibawah perdata sipil yang ditetapkan. Mereka dipantau oleh badan-badan pemerintah yang terkait dengan tujuan mereka, selama mereka masih belum resmi dibawah naungan CAA, asset-aset mereka atas kepemilikan pribadi tidak untuk organisasi.

Pembentukan dan operasi dari kelompok-kelompok yang “tidak terdaftar” tidak dilarang oleh hukum. Tidak ada sanksi atau hukuman untuk melaksanakan kegiatan yang dilakukan oleh organisasi yang tidak terdaftar. Meskipun demikian, kelompok-kelompok ini tidak dapat membuka rekening bank, sewa properti, mengajukan kontrak atau mengajukan subsidi kepada pemerintah. Di satu sisi, undang-undang menciptakan kondisi yang umumnya menguntungkan bagi LSM dalam hal kegiatan mereka di sejumlah bidang kehidupan publik dan untuk kesinambungan keuangan mereka. Hal tersebut tidak membatasi perekonomian

⁶⁹ *Ibid.* Hal 39

LSM dan kegiatan pengumpulan dana. Undang-undang pajak ini juga cukup menguntungkan untuk LSM. Ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang pajak penghasilan Taiwan menyatakan bahwa pendidikan, budaya dan bunga umum serta organisasi amal didirikan sesuai dengan hukum dibebaskan dari pajak penghasilan. Undang-undang ini juga menawarkan manfaat pajak untuk filantropi. Undang-undang pajak penghasilan menyatakan bahwa bisnis nirlaba dapat memberikan 10% dari NPO⁷⁰ laba bersih sebelum pajak dan bahwa seorang individu dapat memberikan kurang dari 20% dari pendapatan kotor tahunan mereka.

⁷⁰ NPO adalah kepanjangan dari *Non Profit Oriented*

BAB 3.

PERISTIWA *SUNFLOWER MOVEMENT* DI TAIWAN TAIWAN 2014

Dalam bab 3 ini, penulis akan membahas tentang *Sunflower Movement* di Taiwan tahun 2014. Mulai dari apa yang dimaksud, sejarah terbentuknya, apa saja bentuk gerakan, dan siapa saja aktor yang terlibat dalam *Sunflower Movement* di Taiwan tahun 2014.

3.1. Kebijakan Taiwan terhadap China dibawah Masa Pemerintahan Presiden Ma Ying Jeou

Sejak terpilihnya Ma Ying Jeou sebagai Presiden Taiwan, adanya kebijakan yang diterapkan pada masa pemerintahannya yang cenderung paling terbuka dengan China dibandingkan dengan Masa pemerintahan sebelumnya. Dengan dilakukannya perjanjian CSSTA antara kedua Negara menunjukkan bahwa adanya upaya untuk lebih mempererat hubungan antara China dan Taiwan melalui sektor perdagangan. Presiden Ma berkeyakinan bahwa untuk mempertahankan kedaulatan Negara tidak hanya melalui sektor militer. Namun, dengan dibukanya kran perdagangan dengan China juga akan membantu Taiwan untuk terus berkembang seiring dengan perkembangan dunia industri internasional.

Kebijakan Taiwan saat ini lebih terbuka dengan China dengan melakukan integrasi ekonomi dan melakukan beberapa perjanjian-perjanjian perdagangan meskipun tidak langsung dilakukannya di awal masa pemerintahan. Presiden Ma Ying Jeou yakin bahwa diadakannya perjanjian ini akan berdampak baik bagi Taiwan sendiri tanpa mengesampingkan isu reunifikasi dengan China. Meskipun China tengah terus berupaya untuk melakukan proses penyatuan wilayah kembali dengan Taiwan namun hal ini tidak akan mempengaruhi kedaulatan Taiwan sendiri. Karena bidang politik dan ekonomi adalah dua bidang yang saat ini bisa dipisahkan menurut Presiden Ma.

Pemerintah Taiwan sendiri sangat antusias dengan terpilihnya Ma Ying Jeou sebagai presiden Taiwan pada tahun 2008 tersebut. Ma Ying Jeou yang merupakan politisi dari Partai Nasionalis Koumintang (KMT) melakukan banyak

perubahan terkait dengan hubungan Taiwan dan China. Dengan terpilihnya Ma Ying Jeou, hubungan China dan Taiwan berangsur membaik namun baik Ma Ying Jeou dan Taiwan tetap mempertahankan *status quo*. “*There is three n’so, no unification during his term in office, no pursuit of de jure independence and no use of force to resolve differences across the Straits*” Ma Ying Jeou⁷¹

Semenjak masa pemerintahan Ma Ying Jeou, sangat jarang sekali terjadi perselisihan dengan China. Hal ini karena Presiden Ma sendiri menerapkan kebijakan luar negerinya dengan sebutan *three legs of national security* yaitu: Hubungan Damai Lintas – Selat, Diplomasi yang layak dan Pertahanan Negara yang kuat.⁷² Selama masa pemerintahannya, hubungan China dan Taiwan banyak mengalami peningkatan terutama dibidang perdagangan. Dengan adanya beberapa klausul perjanjian China – Taiwan terkait dengan terbukanya beberapa sektor tourism untuk masyarakat China maupun Taiwan hal ini berdampak baik dengan meningkatnya perekonomian kedua Negara. Sejak dibukanya klausul perjanjian penerbangan langsung, jumlah penerbangan lintas China – Taiwan pun bertambah. Adanya kerangka perjanjian ECFA membuat beberapa anak perjanjian pun lahir seperti perjanjian *Cross Strait Service Trade Agreement* antara China dan Taiwan. Perjanjian ini dianggap titik melunaknya Taiwan dibidang ekonomi terhadap China meskipun di bidang politik Presiden Ma tetap bersikap hati-hati dan waspada terkait dengan isu reunifikasi dengan China.

Namun kesepakatan perdagangan antara kedua Negara ini menimbulkan kekhawatiran yang muncul dikalangan masyarakat Taiwan. Dianggap pemerintahan Ma melunak terhadap Taiwan berakibat adanya protes yang muncul dikalangan masyarakat. Perjanjian CSSTA yang sebelumnya diloloskan dan di ratifikasi secara tidak transparan Karena lewatnya proses peninjauan kembali pada saat itu memicu adanya gerakan masa di Taiwan yang disebut *Sunflower Movement*.

⁷¹ Taiwan Détente Gamble. Interviewe with Ma Ying Jeou. The wallstreet Journal. Dalam <http://www.wsj.com/articles/SB10001424052748703514404574588863008012766>. Diakses pada 26 September 2016

⁷² Adzani, Dhaifina Nur. *Munculnya Sunflower Movement di Taiwan sebagai respon terhadap Cross Strait Service Trade Agreement antara Taiwan dan China*. 2015. Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik – UNPAR. Hal 47

3.2. Penandatanganan Perjanjian Lintas – Selat

Setelah lama terlibat konflik wilayah antara China dan Taiwan, pada tanggal 29 Juni 2010 kedua Negara melakukan sebuah langkah yang fenomenal yaitu ditandatanganinya perjanjian dagang *Economic Cooperation Framework Agreement* (ECFA), hal ini merupakan babak baru dalam hubungan kedua negara.⁷³ Kerjasama ini melibatkan kerjasam Ekonomi, Komoditas, Perbankan, dan Jasa. Perjanjian ini baru disahkan pada tanggal 12 September 2010.⁷⁴ Setelah diresmikannya kerangka perjanjian perdagangan ini, kemudian kedua belah pihak melakukan perundingan kembali mengenai tindak lanjut dari ECFA yaitu perjanjian dagang lintas-selat China dan Taiwan dalam *Cross Strait Service Trade Agreement* (CSSTA). Di bawah perjanjian CSSTA ini terdapat kesepakatan yaitu dalam konteks perjanjian Kerangka Kerjasama Ekonomi Lintas-Selat (ECFA), hal ini bertujuan untuk meresmikan praktik bisnis yang ada dan penghapusan pembatasan perdagangan. China akan membuka 80 sektor pasar sementara Taiwan 64 sektor industri. Sebagai ekonomi yang lebih kecil, Taiwan diharapkan dapat memberikan manfaat lebih dari pasar yang lebih besar yaitu China. Banyak pengamat telah memproyeksikan keuangan dan ritek-ritek terkait Taiwan, yang bersama-sama membentuk sekitar 25% dari produk domestic bruto Taiwan (PDB) akan muncul sebagai manfaat utama diadakannya perjanjian ini. seperti contoh, perusahaan Sekuritas Taiwan akan memenuhi syarat untuk operasi sepenuhnya yang berlisensi di China dan saham investasi maksimal hingga 51% dari total usaha. Bank Taiwan bisa menawarkan perluasan Renminbi (RMB) layanan platform dan membuka sub-cabang di Provinsi Fujian, China.⁷⁵

⁷³ Widarsa, Avina Nadhila. 2011. *Kepentingan China dalam Penandatanganan Cross Strait Economic Cooperation Framework Agreement*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Depok.

⁷⁴ Adzani, Dhaifina Nur. *Munculnya Sunflower Movement di Taiwan sebagai respon terhadap Cross Strait Service Trade Agreement antara Taiwan dan China*. 2015. Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik – UNPAR. Hal 41

⁷⁵ Fan, Joan. 2014. *The Economics of the Cross-Strait Services Agreement*. Dalam <http://thediplomat.com/2014/04/the-economics-of-the-cross-strait-services-agreement/> diakses pada 26 September 2016

Sementara liberalisasi perdagangan memungkinkan reformasi structural dan alokasi sumberdaya lebih rasional, selain pembukaan pasar lebih luas, CSSTA ini bukan merupakan perjanjian yang tanpa adanya kelemahan didalamnya. Secara khusus, hal ini memupuk persaingan asimetris, kurang mencerminkan keunggulan komparatif penyedia layanan dan tidak membahas kelompok terpinggirkan.

Tidak lama setelah dibawa kembali ke Taiwan unuk dilakukan tinjauan ulang atas isi perjanjian ini yang dilakukan oleh DPP (*Democratic Progressive Party*) dan KMT (Koumintang) untuk mencapai sebuah kesepakatan bahwa perjanjian CSSTA ini akan di tinjau isi per klausul dalam legislatif Yuan. Banyak pihak yang menyayangkan langkan yang diambil presiden Ma karena hal ini dianggap akan mengancam keamanan dan kedaultan nasional. Atas dasar banyaknya tuntutan masyarakat terkait peninjauan ulang isi perjanjian tersebut dan akhirnya menjadi isu viral dilingkup nasional, presiden Ma pada akhirnya harus mendengar pendapat public terlebih dahulu sebelum melakukan referendum perjanjian tersebut. Pada tanggal 25 september, kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan 16 *public hearing*⁷⁶. Dprakarsai oleh DPP dan KMT untuk mendapatkan masukan, dan protes dari kalangan masyarakat, pebisnis. Namun kenyataan dilapangan, dengan diadakannya *public hearing* terdapat perselisihan didalamnya.

Peninjauan terhadap CSSTA sangat penuh dengan kesulitan. Pihak KMT telah melakukan peninjauan terhadap perjanjian tersebut sebanyak 8 kali dalam seminggu. Sementara pihak DPP menggunakan metode dari legislative dengan menunda dilaksanakannya peninjauan dan CSSTA tidak akan diloloskan sebelum bulan desember. Pada 11 maret 2014, Presiden Ma menghadiri pertemuan tahunan AS-China dalam *Economic and Security Review Commision (USCC)*.⁷⁷ Dalam

⁷⁶ Mendengar pendapat public Taiwan terkait dengan perjanjian CSSTA

⁷⁷ AS-China Komisi Ekonomi dan Keamanan Ulasan diciptakan oleh Kongres Amerika Serikat pada Oktober 2000 dengan mandat legislatif untuk memantau, menyelidiki, dan menyerahkan kepada Kongres laporan tahunan tentang implikasi keamanan nasional dari perdagangan bilateral dan hubungan ekonomi antara Inggris Amerika dan Republik Rakyat Cina, dan untuk memberikan rekomendasi, bila sesuai, kepada Kongres untuk tindakan legislatif dan administratif. Dalam U.S.-CHINA | ECONOMIC and SECURITY REVIEW COMMISSION, www.uscc.gov/ diakses pada 26 September 2016

pertemuan tersebut dia menyatakan bahwa pemerintah akan menjamin CSSTA untuk ditinjau dan diratifikasi dibulan Juni 2014 setelah dilakukan *public hearing*.⁷⁸

Pada tanggal 17 Januari 2014, dilakukan peninjauan perjanjian kembali menyusul terjadinya bentrokan di dalam legislatif. Ketua legislator KMT, Chang Ching Chung menyatakan bahwa upaya peninjauan 90 hari perjanjian CSSTA telah berakhir. Maka rancangan perjanjian tersebut dianggap telah selesai ditinjau dan akan segera melakukan voting setelahnya. Pihak DPP tetap menginginkan diadakannya peninjauan kembali namun dari pihak KMT sudah merasa telah melakukannya dan langkah selanjutnya adalah voting. Karena adanya perbedaan pendapat terjadi sudah atau tidaknya peninjauan tersebut, KMT dan DPP akhirnya terlibat perselisihan sehingga pihak KMT menyangka bahwa DPP berencana untuk memboikot CSSTA.⁷⁹ Hal tersebut berdampak pada tidak terlalu dihiraukannya peninjauan kembali klausul per klausul atas perjanjian tersebut karena pemerintah terlalu fokus menanggapi perselisihan KMT dan DPP sehingga melewatkan proses terpenting dari fenomena ini. oleh karenanya, ketegangan dikalangan masyarakatpun semakin meningkat melihat bahwa bukannya pemerintah fokus terhadap isi perjanjiannya namun lebih kepada perselisihan antar keduanya.

Sehari setelah CSSTA dinyatakan lolos peninjauan kembali, 300 mahasiswa memasuki gedung legislatif Yuan. Kedatangan mereka bertujuan untuk memprotes disahkannya perjanjian CSSTA tanpa adanya proses yang demokratis. Tidak adanya peninjauan secara serius dan tidak transparannya proses tersebut membuat mahasiswa dan masyarakat sipil di Taiwan bergerak untuk meminta pertanggungjawaban pemerintah atas pembuatan kebijakan lintas-selat dengan China ini.

⁷⁸ Adzani, Dhaifina Nur. *Munculnya Sunflower Movement di Taiwan sebagai respon terhadap Cross Strait Service Trade Agreement antara Taiwan dan China*. 2015. Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik – UNPAR. Hal 42

⁷⁹ Cole, J. Michael. 2014. *Sunflowers in Springtime: Taiwan's Crisis and the End of an Era in Cross-Strait Cooperation*. *China Brief Volume: 14 Issue: .* Dalam http://www.jamestown.org/programs/chinabrief/single/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=42209&tx_ttnews%5BbackPid%5D=758&no_cache=1#.V-j87tJq3IU. Diakses pada 26 September 2016

3.3. Munculnya *Sunflower Movement* di Taiwan

Pada tanggal 29 Juni 2010, Presiden Taiwan Ma Ying Jeou menandatangani perjanjian bersejarah antara China dan Taiwan yaitu *Economic Cooperation Framework Agreement* (ECFA) untuk menormalkan hubungan perdagangan lintas – selat kedua negara. Sesuai dengan ketentuan pasal 4 dalam ECFA, kedua pemerintah sepakat untuk menegosiasikan kesepakatan layanan perdagangan untuk melindungi apenyedia layanan, memperluas ukuran pasar, mempromosikan kerjasama antar industri dan memngurangi tindakan pembatasan, kedua negara sepakat mendatangi *Cross Straits Service Agreement* (CSSTA) pada 21 Juni 2013.⁸⁰ Masyarakat sipil Taiwan dan mahasiswa dengan melakukan diskusi publik yang terbuka menekankan pada dampak negative untuk usaha kecil dan menengah Taiwan serta kecenderungan untuk bergantung dengan China akan semakin besar.

Sebelum munculnya *Sunflower Movement* di Taiwan tahun 2014, ada beberapa gerakan mahasiswa dan masyarakat sipil yang menuntut pemerintah terkait dengan kebijakan presiden Ma Ying Jeou cenderung lebih terbuka dengan China dibandingkan dengan presiden-presiden Taiwan sebelumnya. Gerakan mahasiswa tersebut kemudian diberi nama *Wild Lilly Movement* yang terjadi pada tahun 2008. Namun karena massa yang sedikit dan bentuk gerakan tidak terlalu massif, gerakan ini kemudian menghilang begitu saja. *Sunflower Movement* sendiri merupakan gerakan yang hampir sama dengan gerakan *Wild Lilly Movement* dengan beberapa perubahan dan perkembangan didalamnya, gerakan *Sunflower Movement* akhirnya bisa berhasil dilakukan.

Sunflower Movement sendiri adalah gerakan sosial yang muncul di Taiwan karena adanya protes yang dilakukan oleh Mahasiswa, Akademisi dan Masyarakat sipil di Taiwan terkait dengan tuntutan mereka terhadap ratifikasi Perjanjian Perdagangan Lintas - Selat antara China dan Taiwan yang disebut *Cross Strait Service Trade Agreement* (CSSTA). CSSTA sendiri merupakan perjanjian lintas –

⁸⁰ Yan, Huang-ting. 2014. *Policy Outcomes of Social Movements in Taiwan: Issue Orientation, Party System and Strategic Interaction from Two Cases*. Department of Political Science, National Taiwan University E-mail: b99a01139@ntu.edu.tw. Hal. 11

selat antara China dan Taiwan. Dalam perjanjian ini, terdapat 80 sektor barang China yang dapat masuk ke Taiwan sedangkan Taiwan sendiri memiliki 64 sektor industri yang bisa masuk ke pasar China. Menurut presiden Ma Ying Jeou, perjanjian ekonomi yang dilakukan Taiwan dan China dapat memicu pertumbuhan ekonomi di China namun tidak bagi masyarakat sipil di Taiwan. Mereka berasumsi bahwa perjanjian ini justru menjadi titik kelemahan Taiwan terhadap China. Peningkatan perekonomian makro⁸¹ tidak berbanding lurus dengan pertumbuhan perekonomian mikro⁸². Dan semakin besar pengaruh ekonomi China ke Taiwan ditakutkan akan menimbulkan kekhawatiran politik terkait dengan isu reunifikasi yang sangat gencar diusahakan oleh China terhadap Taiwan.

Gerakan sosial masyarakat sipil Taiwan ini bertujuan untuk memprotes pemerintah Taiwan atas di ratifikasinya pakta perdagangan antara China dan Taiwan yang kemudian di protes karena adanya klausul perjanjian yang dianggap tidak sesuai dengan perekonomian Taiwan. Protes tersebut kemudian diberi nama *Sunflower Movement*. Gerakan ini muncul ketika partai *incumbent* KMT terus berupaya untuk segera meratifikasi perjanjian perdagangan tersebut tanpa melalui proses peninjauan yang demokratis. Hal itu menyebabkan mahasiswa dan masyarakat sipil yang tergabung dalam *Sunflower Movement* menyerbu gedung parlemen dan menduduki gedung tersebut selama 24 hari.

⁸¹ Ekonomi makro merupakan kegiatan perekonomian yang mempelajari secara keseluruhan, artinya dalam cabang ilmu ekonomi makro menjelaskan perubahan ekonomi yang memengaruhi banyak masyarakat, perusahaan, dan pasar. Dalam perkembangan Ekonomi Makro berkaitan dengan masalah ekonomi publik (negara). Aspek analisis dalam Ekonomi Mikro adalah sebagai berikut: Pendapatan nasional, Investasi, Kesempatan kerja, Inflasi, Neraca pembayaran. Dalam *Pengertian Ekonomi Makro dan Mikro Serta Perbedaan*. <http://www.artikelsiana.com/2015/05/pengertian-ekonomi-makro-mikro-perbedaan.html#> (Diakses 6 Desember 2016)

⁸² Ekonomi mikro merupakan kegiatan perekonomian yang mempelajari hanya pada bagian kecilnya, artinya bagian kecilnya yaitu seperti perilaku konsumen dan perusahaan serta penentuan harga-harga pasar dan kuantitas faktor input, barang, dan jasa yang diperjualbelikan. Dalam perkembangan ekonomi mikro yang kini telah melahirkan beragam teori dan konsep mengenai ekonomi regional, ekonomi manajerial, ekonomi lingkungan, dan ekonomi sumber daya alam. Dalam aspek analisis Ekonomi Mikro adalah sebagai berikut: Analisis biaya dan manfaat, Teori permintaan dan penawaran, Elastisitas, Model-model pasar, Industri, Teori produksi, Teori harga. *Ibid*

Bentuk gerakan *Sunflower Movement* ini dimulai sejak mahasiswa Taiwan yang menggandeng asosiasi pemuda *Black Island Nation Youth* menyerbu gedung legislatif Yuan untuk melakukan beberapa tuntutan kepada pemerintah. Upaya pemerintah untuk menghalangi terjadinya kerusuhan di gedung legislaif pun mengerahkan pengamanan dari pihak kepolisian Taiwan untuk menghalangi para demonstran masuk ke dalam gedung legislaif Yuan. Demontran ini akan terus duduk di legislative Yuan selama 24 hari sebagai bentuk protes mereka terhadap pemerintah. Gerakan demonstrasi ini merupakan gerakan terbesar sepanjang sejarah terjadinya gerakan massa di Taiwan. Hal ini disebabkan karena isu mengenai pihak pemerintah yang tidak demokratis dalam melakukan peninjauan ulang CSSTA tersebut dianggap tidak demokratis.

Isu tentang *undertable agreement* antara China dan Taiwan semakin menguat setelah terjadinya proses peninjauan ulang sampai proses ratifikasi yang berlangsung secara tidak demokratis. Ketakutan masyarakat Taiwan mengenai isu reunifikasi dengan China dan ancaman kedaulatan membuat masyarakat Taiwan secara massif meminta pemerintah untuk lebih jeli dalam melakukan perjanjian dengan China. Oleh sebab itu, mahasiswa dan aliansi masyarakat sipil Taiwan kemudian membentuk gerakan *Sunflower Movement* ini.

China dan Taiwan sendiri merupakan 2 negara yang terpisah sejak perang saudara 60 tahun lalu⁸³ tetapi China masih menganggap bahwa Taiwan adalah wilayahnya. Dibawah pemerintahan Taiwan Ma Ying Jeou, hubungan China dan Taiwan semakin membaik. Presiden Ma Ying Jeou menegaskan bahwa peningkatan hubungan ini melalui perjanjian perdagangan yang disepakati oleh kedua negara dan hal ini dianggap penting untuk meningkatkan daya saing perekonomian Taiwan. Namun, banyak masyarakat yang skeptis terhadap peningkatan hubungan antara China dan Taiwan ini sehingga masyarakat menuntut agar pemerintah lebih transparan dalam meninjau hubungan bilateral ini.

⁸³ http://www.huffingtonpost.com/2014/03/31/taiwan-sunflower-movement_n_5062576.html

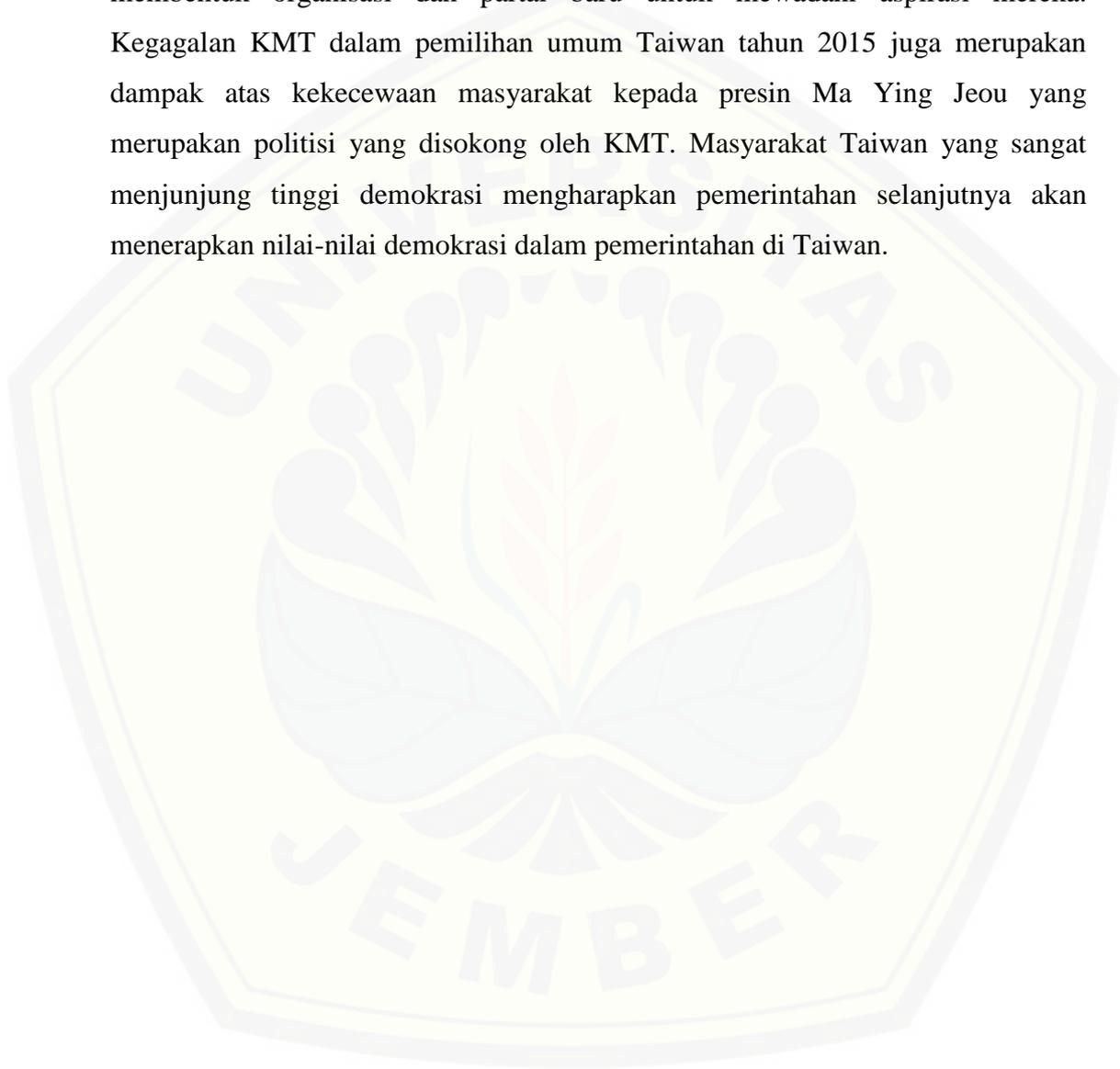
BAB 5.

KESIMPULAN

Sunflower Movement merupakan gerakan massa yang terjadi di Taiwan pada tahun 2014. Gerakan tersebut diprakarsai oleh 2 mahasiswa Taiwan yaitu Chen Wei-Ting dan Le Fei-Fan bersama dengan serikat mahasiswa *Black Island Youth Front*, *Green Citizens Action Alliance 1992* dan *Citizens Action Coalition 1995* serta masyarakat sipil Taiwan untuk menuntut dibatalkannya ratifikasi CSSTA tersebut.

Terdapat 4 faktor penting mengapa *Sunflower Movement* ini bisa terjadi di Taiwan, yaitu: Faktor Partisipasi Politik, Faktor Ekonomi, Faktor Politik, Faktor Kepemimpinan dan Organisasi. Dalam faktor partisipasi politik, masyarakat Taiwan yang memiliki kepekaan terhadap urusan politik dalam negerinya membuat mereka kemudian berkembang menjadi masyarakat yang aktif turut serta dalam proses perpolitikan dalam negeri sehingga bentuk partisipasi politik masyarakat Taiwan memungkinkan untuk terciptanya suatu gerakan sosial. Dalam faktor ekonomi, dimana integrasi ekonomi yang dilakukan pemerintah China melalui perjanjian ECFA dan kemudian CSSTA justru mendapat penolakan karena adanya klausul perjanjian *Early Harvest* yang dianggap dapat merugikan pelaku industri kecil-menengah di Taiwan. Dalam faktor politik, terkait dengan proses ratifikasi yang dilakukan oleh Pemerintah Taiwan dan China dianggap tidak transparan. Tuntutan yang diminta oleh demonstran terkait dengan peninjauan kembali klausul perjanjian tidak dilakukan sesuai dengan prosedur demokrasi yang di junjung tinggi oleh masyarakat Taiwan. Dalam faktor Kepemimpinan dan Organisasi, kultur masyarakat Taiwan yang sudah terbiasa dengan adanya gerakan sosial, LSM dan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi di negara membuat mereka akan mudah melakukan gerakan dan menyampaikan tuntutan mereka kepada pemerintah. Keberadaan LSM dan Organisasi sosial yang semakin hari semakin diperhatikan oleh pemerintah menjadi sarana yang memudahkan masyarakat untuk bergerak. Karena di Taiwan sendiri, menyampaikan pendapat dari masyarakat kepada pemerintah ini menjadi katalisator demokrasi di Taiwan.

Fenomena terjadinya *Sunflower Movement* di Taiwan tersebut mendapat dampak yang cukup signifikan terhadap perkembangan organisasi di Taiwan. Kekecewaan masyarakat Taiwan terhadap pemerintah yang dianggap gagal mempertahankan nilai-nilai demokrasi membuat masyarakat kemudian membentuk organisasi dan partai baru untuk mewadahi aspirasi mereka. Kegagalan KMT dalam pemilihan umum Taiwan tahun 2015 juga merupakan dampak atas kekecewaan masyarakat kepada presin Ma Ying Jeou yang merupakan politisi yang disokong oleh KMT. Masyarakat Taiwan yang sangat menjunjung tinggi demokrasi mengharapkan pemerintahan selanjutnya akan menerapkan nilai-nilai demokrasi dalam pemerintahan di Taiwan.



DAFTAR PUSTAKA**Buku**

- Arikunto, Suharsini. 1986. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Bina Aksara, Jakarta.
- Hadi, Sutrisno. 1989. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Maarif, Samsul. 2010. *Perilaku Kolektif dan Gerakan Sosial: Bahan Ajar Sosiologi*. Yogyakarta: Gress Publishing.
- Nawawi, Hadar. 1991. *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajahmada University Press.
- Sukmadinata, Syaodin Nana 2006. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- The, Liang Gie. 1968. *Ilmu Politik*. Yogyakarta: Yayasan Studi Ilmu dan Teknologi.
- The, Liang Gie. 1984. *Ilmu Politik: Suatu Pembahasan Tentang Pengertian, Kedudukan dan Metodologi*. Yogyakarta: Gajahmada University Press.

Jurnal

- Hsiao, Hsin-Huang Michael. 2011. Democratization and Bureaucratic Resctructuring in Taiwan (Summer 2000). Dalam *Studies in Comparative International Development; Summer 2000*; 35, 2. Diakses di <http://search.proquest.com/docview/220627740/3FC7EB5E2CC24399PQ/12?accountid=38628> (15 Agustus 2016)
- Klandermans, Bert. 1984. Mobilization and Participation: Social-Psychological Explanation of Resource Mobilization Theory. *American Sociological Review*, 49 (5). Diakses di <https://investimentosocial.wikispaces.com/file/view/14858682.pdf> (30 Mei 2016)
- Locher, David 2002. A . Collective Behavior and Social Movements Spring 2008, 1-1:50, MWF, Chavez 405. Dalam *Sociology 313*. New Jersey: Prentice Hall. Diakses di <http://www.u.arizona.edu/~jeremiah/Soc%20313%20Syllabus%20Spring%2008.doc> (30 Mei 2016)

Pichardo, Nelson A. 2013. Resource Mobilization: An Analysis of Conflicting Theoretical Variations. Dalam *Jurnal Sosiologi Reflektif*, Vol. 8, No. 1. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.

Prayogi, I Gede Chandra. 2014. Upaya Reunifikasi Taiwan Ditinjau dari Perkembangan Konflik Selat Taiwan Periode 1981-1991. *Jurnal FISIP Universitas Udayana*, Vol. 1, No. 2. Denpasar: Universitas Udayana.

Singh, Rajendra. 2013. Social Movements, Old and New: A Post-Modernist Critique. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, Vol. 8, No. 1. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.

Sukmana, Oman. 2013. Konvergensi antara Resource Mobilization Theory dan Identity Oriented Theory dalam Studi Gerakan Sosial Baru. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, Vol. 8, No. 1. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.

Triwibowo, Darmawan. 2013. Gerakan Sosial: Wahana Civil Society bagi Demokratisasi. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, Vol. 8, No. 1. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.

Internet

Adhzani, Dhaifina Nur. 2015. *Munculnya Sunflower Movement di Taiwan sebagai Respon terhadap Cross Strait Services Trade Agreement antara Taiwan dan Cina*. Library.unpar.ac.id. Diakses melalui http://library.unpar.ac.id/index.php?p=show_detail&id=206239. (17 Mei 2016)

Arif Gusmayadi dan M. Bakhrudin Alfatah. 2013. *Definisi Hipotesis*. Dalam <http://www.scribd.com/doc/44450313/Definisi-Hipotesis>. (Diakses pada 9 Mei 2016)

Armandhanu, Danny. 2015. *Menengok Hubungan Taiwan-China: Musuh Tapi Mesra*. CNN Indonesia.com. Diakses melalui <http://www.cnnindonesia.com/internasional/20151105135044-113-89679/menengok-hubungan-taiwan-china-musuh-tapi-mesra/>. (17 Mei 2016)

BBC News. 2016. *Pemilu Taiwan mulai berlangsung*. Dalam http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2016/01/160116_dunia_pemilu_taiwan (Diakses pada 23 Mei 2016)

Blanchard, Ben, Popeski, Ron, ed. 2014.. *"China's Xi stresses benefits of ties after Taiwan protests"*. Reuters. Retrieved 9 May 2014. (Diakses 15 Agustus 2016)

- Charpenter, Cahrlie. 2014. *Taiwan's Sunflower Movement; Some Political Questions*. Dalam <http://duckofminerva.com/2014/04/taiwans-sunflower-movement-some-analytical-questions.html> (Diakses pada 1 Maret 2016)
- Time. 2014. *China's First Minister-Level Official Visits Taiwan*". Associated Press. Retrieved 26 June 2014. (Diakses pada 11 November 2016)
- Chung, Lawrence 2014. *"Plan could see mainland Chinese visitors using Taiwan as transit point"*. South China Morning Post. Retrieved 26 June 2014. (Diakses pada 11 November 2016)
- CNN. 2014. *Taiwan Tolak Reunifikasi dengan Tiongkok*. Dalam <http://www.cnnindonesia.com/internasional/20141104182114-113-9669/taiwan-tolak-reunifikasi-dengan-tiongkok/> (Diakses pada 13 Juli 2016)
- E-Ling Chiu. 2015. *The Dilemmas of a Social Movement of the Sunflower*. (Diakses pada 11 November 2016)
- Fan, Joann. 2014. *The Economics of the Cross-Strait Services Agreement*. Brookings.edu. Diakses melalui <http://www.brookings.edu/research/opinions/2014/04/18-taiwan-cross-strait-services-agreement-fan>. (Diakses pada 12 Agustus 2016)
- Feng, Yi-en; Hsu, Stacy. 2014. *"TRADE PACT SIEGE: Celebrities label president, premier 'dictators'"*. Taipei Times. Retrieved 12 October 2014. (Diakses pada 11 November 2016)
- Focus Taiwan; News Channel. 2014. *China Times: Resonance of Sunflower Movement*. Dalam <http://focustaiwan.tw/news/awps/201503170018.aspx>
- Grigorij, Mezesnikov. 2013. *Democratization and Civil Society Development in Taiwan Some Lessons for Central Europe*. Institute for Public Affairs, Bratislava.
- International Sociological Association. 2015. *Global Dialog, Volume 5/Edisi 4/Desember 2015*. Dalam <http://isa-global-dialogue.net/wp-content/uploads/2015/12/v5i4-indonesian.pdf> (Diakses pada 11 November 2016)
- Kementrian Luar Negeri Republic Of China (Taiwan). 2014. *Sekilas Tentang Republic of China*. Dalam <http://www.roc-taiwan.org/public/Attachment/4102317114071.pdf> (Diakses pada 4 Mei 2016)
- Landasan Teori. 2015. *Pengertian Teori Gerakan Sosial Definisi Sebagai Kekuatan Perubahan dalam Politik menurut Para Ahli*. Dalam <http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-teori-gerakan-sosial.html> (Diakses pada 4 Mei 2016)

- Mandey, Adrianus. 2014. *Presiden Taiwan Mundur Sebagai Pemimpin Partai*. Dalam <http://m.news.viva.co.id/news/read/564504-presiden-taiwan-mundur-sebagai-pemimpin-partai> (Diakses pada 27 Februari 2016)
- Martin, Jeffrey T. 2015. *Policing an Occupied Legislature: Symbolic Struggle Over The Police Image in Taiwan's Sunflower Movement*. Dalam https://www.academia.edu/12188388/Policing_an_Occupied_Legislature_Symbolic_Struggle_over_the_Police_Image_in_Taiwan_s_Sunflower_Movement (Diakses pada 3 Agustus 2016)
- National, Politik. 2014. *Taiwan, Antara Tiongkok dan Kemerdekaan*. Dalam <http://www.jia-xiang.biz/tag/gerakan-bunga-matahari/> (15 Juli 2016)
- Needham, Kirsty. 2014. *Sunflower Power Stalls Taiwan Trade Deal*. Dalam <http://www.smh.com.au/world/sunflower-power-stalls-taiwan-trade-deal-20141121-11rl8d.html> (Diakses pada 13 Juli 2016)
- Perwira, Putri. 2012. *Perkembangan Ekonomi dan Politik Taiwan-cieloveu*. Dalam http://putrinyaperwira-fisip09.web.unair.ac.id/artikel_detail-64071-Masyarakat%20Budaya%20dan%20Politik%20Asia%20Timur-Perkembangan%20Ekonomi%20dan%20Politik%20Taiwan.html (8 Juni 2016)
- Politik Indonesia. 2015. *Partai Berkuasa Taiwan Bertemu Presiden Tiongkok*. Dalam <http://www.politikindonesia.com/index.php?k=politik&i=67113> (Diakses pada 7 Agustus 2016)
- Sarah Berning, Carissa Pramitha. 2010. *Taiwan Demo Perjanjian Perdagangan Bebas Dengan China*. Deutsche Welle.com. Diakses melalui <http://www.dw.com/id/taiwan-demo-perjanjian-perdagangan-bebas-dengan-cina/a-5739832>. (Diakses pada 22 Mei 2016)
- Sheng Lee. 2016. *Calls for Investigation into Police after Sunflower Movement Charges Dropped*. Dalam <http://international.thenewslens.com/article/40313> (Diakses pada 18 Juli 2016)
- Sunflower Movement in Taiwan. 2014. Dalam <http://upl8.com/portfolio/sunflower-movement-taiwan/> (Diakses pada 18 Juli 2016)
- Tabloid Jubi. 2015. *Sejarah Singkat Taiwan Sejak 1949*. 2015. Dalam <http://tabloidjubi.com/2015/11/04/sejarah-singkat-taiwan-sejak-1949/> (Diakses pada 3 Agustus 2016)
- Taiwan's Sunflower Movement. 2014. Dalam <http://fpif.org/taiwans-sunflower-movement/> (12 Agustus 2016)

- The Stream. 2014. *Taiwan's 'sunflower movement' wary of Chinese ties*. Dalam <http://stream.aljazeera.com/story/201403311140-0023599> (Diakses pada 4 Juni 2016)
- Tiezzi, Shannon. 2014. *Opponents of Cross-Strait Pact Occupy of Taiwan Legislature*. Dalam <http://thediplomat.com/2014/03/opponents-of-cross-strait-trade-pact-occupy-taiwans-legislature/> (Diakses pada 3 Maret 2016)
- Tristyana, Meyrza Ashrie. 2014. *Konsep dan Teori Gerakan Sosial Politik*. Dalam <https://www.scribd.com/doc/69071644/Definisi-Konsep-dan-Teori-Gerakan-Sosial-Politik>
- Ucup, Supriyadi. 2008. *Proses Keberhasilan Ekonomi Taiwan*. FISIP UI. Diakses dalam <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/116270-T%2024377-Fenomena%20keberhasilan-Literatur.pdf>
- World Post, 2014. *Taiwan's Sunflower Movement Protest Is Also Strikingly Beautiful*. Dalam http://www.huffingtonpost.com/2014/03/31/taiwan-sunflower-movement_n_5062576.html (Diakses pada 2 Mei 2016)
- Yuliantoro, Nur Rachmat. *Hubungan China-Taiwan dalam Pandangan Asia Tenggara*. Dalam <http://rachmat.staff.ugm.ac.id/artikel/China-Taiwan.pdf> (Diakses pada 27 Mei 2016)

LAMPIRAN

Economic Cooperation Framework Agreement (ECFA)

Background

I. Main objectives

1. To promote the normalization of cross-strait economic and trade relations

Although both sides of the Taiwan Strait are currently members of the WTO, many restrictions in cross-strait trade and commerce remain.

2. To avoid Taiwan being marginalized by regional economic integration

The global trend of regional economic integration has led to the signing of approximately 247 free trade agreements (FTAs) in the world so far. Given that signatories provide tariff exemptions on a reciprocal basis, failing to sign FTAs with key trading partners puts Taiwan at risk of being marginalized and losing its competitiveness in major markets. Signing agreements with mainland China, Taiwan's main export market, will help us participate in regional economic integration and mitigate the risk of economic marginalization.

3. To enhance Taiwan's position as a platform for regional investment

Signing trade agreements (arrangements) with mainland China will offer incentives for transnational enterprises to use Taiwan as a trade and investment springboard to the East Asia market, which will help Taiwan to better integrate into the global trading system.

II. An overview of the ECFA

1. What's in a name?

The tentative name for the economic agreement is the Cross-strait Economic Cooperation Framework Agreement (ECFA). The exact title, in both the Chinese and English languages, is to be decided in future negotiations.

2. What is a framework agreement?

Signing a formal agreement requires considerable time and effort. Countries therefore tend to first sign a framework agreement that focuses on the structure and objectives, before negotiating the eventual content. Framework agreements can also be negotiated to include an 'Early Harvest' list, which allows certain critical industries to be eligible for early tariff reductions and privileged market access. This will throw a lifeline to those industries in Taiwan that are in desperate need of tariff reductions to maintain their competitiveness internationally. Framework agreements between countries are not uncommon. For example, the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) has signed such agreements with mainland China, Korea, Japan and India.

3. What will the content of the ECFA be?

The content is subject to negotiations between the two sides. Considering our domestic needs, as well as the model provided by the ASEAN-China Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation, it is likely to include:

- i. Preamble: illustrates the guiding principles of the ECFA and 3 the long-term vision of the two sides for promoting the institutionalization of economic cooperation.
- ii. Chapter 1 (General Provisions): outlines the goals of the agreement and the range of measures for economic cooperation and trade liberalization.
- iii. Chapter 2 (Trade and Investment Liberalization): sets out the range and timetable for future negotiations over agreements on trade in goods and services, investment and so forth.
- iv. Chapter 3 (Economic Cooperation): a major component of the agreement, the scope of which is planned to include industrial cooperation, customs cooperation, trade facilitation, goods inspection, import licensing and food safety.
- v. Chapter 4 (Early Harvest): another major component of the agreement, which identifies items and services eligible for early tariff reductions and early market access.

vi. Chapter 5 (Miscellaneous): includes supporting measures regarding food safety control measures, a mechanism for dispute settlement, the executive body, amendments, date of entry into force, a termination clause and so forth.

4. What is the nature of the ECFA?

The ECFA will not follow the model of agreements signed by mainland China with Hong Kong and Macau. ECFA negotiations are being conducted in compliance with WTO principles and take into full consideration the distinct characteristics of cross-strait relations. As with other agreements concluded between the two sides, the ECFA only 4 deals with cross-strait economic cooperation and does not touch on sovereignty or political issues.

5. What are the guiding principles for the ECFA negotiations?

Negotiations are undertaken on the basis of equality, dignity and fairness, and will not compromise Taiwan's status. Furthermore, as per the President's stated commitments, the government will not open up Taiwan's market any further to agricultural produce from mainland China, nor will it allow mainland Chinese workers into Taiwan. The guiding principles are Taiwan's national needs, public support and legislative oversight.

III. Benefits of an ECFA

1. Improve macroeconomic scale

The simulations conducted by the Chung-Hua Institution for Economic Research using the Global Trade Analysis Project show that Taiwan's trading environment and society will benefit significantly from an ECFA. For instance, an ECFA should boost economic growth by between 1.65% and 1.72%, and create between 257,000 and 263,000 jobs.

2. Strengthen Taiwan's international position

i. Enter mainland China's market before trade competitors;

- ii. Attract foreign direct investment and foster Taiwan's economic restructuring;
- iii. Become a priority cooperation partner and a gateway for foreign businesses seeking to enter and invest in mainland China;
- iv. Encourage Taiwanese enterprises in mainland China to 5 expand their purchases from Taiwan, thereby enhancing the competitiveness of local industries and keeping Taiwan in the manufacturing supply chain; and
- v. Accelerate Taiwan's transformation into a regional industrial operations center.

3. Deepen relations with major trading partners

- i. The American Chamber of Commerce stated in its 2009 Taiwan White Paper, "the conclusion of this trade agreement with China would pave the way for Taiwan to participate in regional trade blocs and enter into bilateral FTAs with additional trading partners."
- ii. The Japanese Chamber of Commerce & Industry in its 2009 Taiwan White Paper Issue affirmed, "If the ECFA comes into being, it should form a great opportunity for Taiwan and Japan to discuss signing an FTA. Therefore, this Chamber sincerely looks forward to progress being made in the ECFA negotiations."
- iii. The European Chamber of Commerce expressed the following opinions in its 2009-2010 Position Paper Overview: ¶ "The sooner Taiwan signs the ECFA with China, the quicker political impediments to other countries (including the EU) signing economic agreements with Taiwan will be removed." ¶ "In order to revitalize Taiwan's economy and increase trade, the ECCT recommends that the government seek 6 to sign an Economic Cooperation Framework Agreement (ECFA) with China and commit to Trade Enhancement measures with Europe as soon as possible. This will help to secure Taiwan's position as an important link between China and Europe and reintegrate Taiwan into the global and regional economy."

IV. Taiwan's measures to mitigate potential negative impacts of ECFA

1. Although Taiwan's overall economic development will benefit from an ECFA, certain local industries would suffer as a result of tariff reductions for mainland Chinese imports. In order to mitigate the negative effects of an ECFA on the impacted industries, the government has set aside a budget of NT\$95 billion to help them. The government also will provide vulnerable industries with suggestions and assistance so that they can adjust and upgrade their competitiveness.
2. In tandem with the effort to promote an ECFA, the government has been seeking to negotiate FTAs with other major trading partners in order to decrease its dependence on mainland China. By adopting this approach, Taiwan can also improve its business environment and reduce the risk of it being marginalized economically in the region.

V. Legislative oversight and the referendum debate

1. During the ECFA negotiations, the government will adhere to the three criteria of "meeting the nation's need, winning the support of the public and proceeding with legislative oversight." The administration will report to the President of the Legislature and the legislative Party Caucus, as well as at the joint meetings of the various legislative committees, on the progress of negotiations to ensure legislative oversight. Once inked, the agreement will not come into effect until passed by the Legislative Yuan.
2. Signing an ECFA is an economic matter that does not involve the issue of sovereignty or politics. As a rule, countries do not ratify FTAs through a referendum. The exception was in Costa Rica where, in 2007, the people voted on the Central American FTA (the CAFTA) that their government had signed with the US but which failed to garner parliamentary support. The CAFTA was subsequently approved in the referendum.

Gambar 1. Simbol Gerakan *Sunflower Movement*



Gambar. Pendudukan Mahasiswa dan Masyarakat sipil Taiwan di gedung parlemen



JEMBER

Gambar 3. Aksi massa di Jalanan Menuntut demokrasi di Taiwan

